

MONITOR BERITA

11

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input checked="" type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH FORUM <input type="checkbox"/> INVESTOR IND. <input type="checkbox"/>
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HALAMAN : 10	
TAHUN 2004	

Minyak Dunia

OPEC Tengah Mengkaji Rentang Harga Basket Minyak Mentah

Jakarta, NERACA

Presiden Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) Purnomo Yusgiantoro menegaskan, Sekretariat OPEC kini sedang mengkaji kembali kisaran harga minyak basket OPEC sehingga lebih mencerminkan perkembangan ekonomi dunia.

"Saat ini Sekretariat OPEC di Wina sedang mengkaji kemungkinan penyesuaian rentang harga dengan memasukkan unsur depresiasi dolar Amerika Serikat (AS) dan inflasi selama empat tahun terakhir. Meski dikoreksi, rentang harga minyak tertinggi pun tidak akan pada tingkat harga setinggi saat ini," kata Purnomo dalam penjelasannya di Jakarta kemarin, menanggapi masih tingginya harga minyak dunia yang sampai saat ini masih bertengger di atas US\$ 40 per barel.

Seperti diketahui, rentang harga (*price band*) OPEC hingga saat ini belum berubah, yaitu US\$ 22-28 per barel. Rentang harga terse-

but, diberlakukan sejak tahun 2000, jauh sebelum krisis Irak dan Timur Tengah, dan persoalan perusahaan Rusia Yukos, yang membawa dampak pada suplai minyak di pasar internasional.

Menurut Purnomo, melonjaknya harga minyak mentah dalam beberapa waktu terakhir yang jauh diatas rentang harga OPEC itu dipengaruhi oleh faktor fundamental dan non fundamental. Dikatakan, pertumbuhan ekonomi dunia khususnya Cina (sekitar 14%) dan Amerika Serikat (sekitar 2%) memicu peningkatan konsumsi minyak mentah yang lebih tinggi dari yang diperkirakan semula.

"Namun kalau hanya dari faktor ini, harga minyak mentah tidak akan melonjak hingga di atas US\$ 40/barel, karena sesungguhnya pasokan minyak mentah saat ini sekitar 1,5 juta barel per hari diatas kebutuhan dunia bahkan produksi OPEC sudah mencapai 30 juta barel per hari (termasuk Irak) atau sekitar 2 juta barel per hari diatas kuota OPEC," tuturnya.

Purnomo berpendapat kenaikan harga minyak lebih disebabkan oleh faktor nonfundamental akibat gejolak politik dan ancaman teror khususnya di Timur Tengah yang menyebabkan kepanikan pasar. Selain itu, makin ketatnya standar lingkungan produk bensin di AS juga menyebabkan terjadinya gangguan distribusi yang turut menyebabkan kenaikan harga minyak khusus jenis *sweet crude oil*.

"Kasus yang menimpa produsen minyak Yukos Rusia turut menyebabkan kepanikan pasar terhadap kemungkinan terjadinya gangguan pasokan minyak mentah dunia," ucapnya.

Sebelumnya, Purnomo mengemukakan bahwa sebagai komoditas yang sangat strategis dalam perekonomian dunia, suatu stabilitas harga minyak yang memberikan margin keuntungan bagi produsen (*fair return*) dan masih mampu dibeli oleh konsumen secara wajar, merupakan misi utama OPEC dalam situasi kebutuhan minyak yang sangat tinggi serta

ancaman keterbatasan pasokan akibat berbagai peristiwa geopolitik saat ini.

Peran OPEC saat ini menurut menteri yang juga Pjs Sekjen OPEC, semakin strategis menyusul terus membungungnya harga minyak dunia. Sejauh ini hanya OPEC yang masih memiliki kapasitas cadangan yang setiap saat bisa dikeluarkan meskipun tentu saja bukan tak terbatas. Sebagai bentuk nyata tanggung jawab OPEC dalam menstabilkan harga minyak dunia adalah produksi OPEC yang sudah jauh diatas kuota awal yang kini sudah mencapai 26 juta barel per hari.

Diungkapkan, berbagai peristiwa yang melatarbelakangi kenaikan harga minyak yang tinggi saat ini barangkali merupakan salah satu masa tersulit dalam sejarah OPEC yang memerlukan analisis dan strategi yang tepat. Dalam hal ini, Purnomo menegaskan bahwa OPEC tetap akan memainkan peranan utamanya untuk menstabilkan harga minyak. (31)

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input checked="" type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA						<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH FORUM <input type="radio"/> INVESTOR IND. <input type="radio"/>																								
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS						<input type="checkbox"/> GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL <input type="checkbox"/> UMUM																								
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HALAMAN : 10											TAHUN 2004																			

Kilang Minyak BBM

Pertamina Akan Perbaiki Kilang-kilang Tua

Jakarta, NERACA

PT (Persero) Pertamina berencana memperbaiki sejumlah kilang minyaknya yang berumur tua agar bisa kembali berproduksi secara efisien dan optimal. Namun kilang yang tidak bisa ditingkatkan lagi produktivitasnya akan ditutup atau diinvestasikan kepada pihak lain.

"Kita akan lakukan pembenahan terhadap kilang yang umurnya tua. Kalau perlu ditutup atau dijual saja, tapi yang masih bisa ditingkatkan produktivitasnya, akan diperbaiki," kata Wakil Direktur Utama Pertamina, Mustiko Saleh sesuai Rapat Dengar Pendapat Dengan Komisi VIII DPR RI di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, ada beberapa kilang tua yang masih bisa ditingkatkan efisiensinya dan bila masih memungkinkan untuk diversifikasikan untuk kegiatan non BBM (pengolahan minyak menjadi BBM) seperti petrokimia. Sementara untuk kilang tua yang tidak produktif lagi bisa jadi ditutup ataupun dijual kepada pihak lain.

Ia mencontohkan kilang di Pangkalan Brandan, Sumatera Utara, yang dianggap sudah tidak produktif lagi bisa saja segera ditutup ataupun di diversifikasikan

Tapi untuk kilang Kasim, Papua, masih diupayakan untuk dilakukan perbaikan.

Sebelumnya, Direktur Utama Pertamina Widya Purnama menjelaskan kegiatan usaha Pertamina, tidak saja di bidang BBM tapi juga akan dikembangkan kepada sektor non BBM seperti produk Chemical.

"Nanti akan ada Pertamina Chemical yang menangani kegiatan di sektor petrokimia yang bisa dikembangkan pada produk-produk aromatic mengingat pasarnya sangat menjanjikan khususnya di dalam negeri," kata Widya.

Disebutkannya, pasar dalam negeri untuk produk-produk chemical sangat terbuka lebar dan ini akan dimanfaatkan secara maksimal oleh Pertamina.

"Diharapkan ini akan berjalan dengan baik, sehingga ke depan sektor chemical ataupun produk-produk aromatic bisa menjadi andalan perusahaan dalam meraih pendapatan yang lebih besar sehingga turut mendorong kejayaan perusahaan di masa mendatang," katanya.

Neraca mencatat, sebelumnya Pertamina mengakui kapasitas kilang minyak di Indonesia jauh dari kondisi ideal. Pasalnya saat

ini, seluruh kilang di Indonesia berada dalam kondisi 100% terpakai atau jauh lebih besar dibandingkan negara lainnya seperti Singapura atau Thailand.

Akibatnya, jika salah satu kilang minyak Pertamina berada dalam perawatan, maka Indonesia harus mengimpor minyak mentah. "Mengapa jika kilang Pertamina dirawat semua pihak ribut? Padahal kalau di Singapura tidak.

Ini karena kapasitas kilang kita dioperasikan 100 persen seperti misalnya kilang Balongan. Ini tidak benar," kata Ariffi Nawawi ketika masih menjabat Dirut Pertamina ketika itu.

Menurut dia, seluruh kilang minyak di dunia tidak ada satupun yang beroperasi dengan kapasitas 100%.

Di Singapura misalnya, kapasitas terpakai kilangnya hanya 60% hingga 70% atau Thailand sebesar 70%.

"Namun, mau tidak mau kita memang harus mengoperasikannya karena kita kekurangan kilang. Jadi kita terpaksa melakukannya karena tidak ada jalan lain," ungkap Ariffi.

Ia menegaskan, jika salah satu kilang Pertamina diperbaiki maka Pertamina tetap akan menjamin

kesediaan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM).

Karena itu Pertamina menghimbau masyarakat agar tidak terlalu membesarkan dan mengkhawatirkan perawatan yang dilakukannya terhadap sejumlah kilang.

"Kita akan semaksimal mungkin berusaha agar minyak tersedia. Tapi harus diingat juga kalau suatu barang dipakai secara terus menerus maka perlu dirawat," katanya.

Sebelumnya, kilang Balongan sendiri pada 21 Januari 2004 sempat mengalami kerusakan terutama pada unit Residue Catalytic Crackernya. Meski kerusakan itu merupakan yang kesekian kalinya namun ini merupakan yang pertama sejak beroperasi Agustus 2000 lalu setelah mengalami *turn over*.

Namun pada kerusakan 2000 sebelumnya, Pertamina terpaksa melakukan pengolahan minyak mentahnya (*crude processing deal* CPD) ke kilang milik Singapura Petroleum Company.

Untuk melakukan CPD di Pertamina mengimpor minyak mentah dari perusahaan minyak milik pemerintah Iran. National Oil Company sebesar 80.000 barrel per hari (bph). (22)

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

HALAMAN : 1

TAHUN 2004



Widya Purnama

Di bagian lain, Widya menyatakan bahwa Pertamina berencana membangun tambahan kapasitas terminal penimbunan bahan bakar minyak (BBM) di beberapa daerah guna menjaga keamanan pasokan BBM di masa depan. "Untuk menjamin pengadaan BBM ke depan dan pengadaan program pasok yang baik, ketersediaan *small vessel* untuk pasokan ke lokasi *remote* sangat dibutuhkan," tuturnya.

Menurut rencana, pembangunan itu dilakukan terhadap terminal utama Balongan dengan tambahan kapasitas timbun sebanyak 250.000 kilo liter (Kl) pada tahun 2005, terminal utama Tuban dengan kapasitas 450.000 Kl (tahun 2007), Depot Cikampék dengan kapasitas 89.000 Kl (prediksi tahun 2005), Depot Teras dengan kapasitas 600.000 Kl (prediksi awal 2005), dan terminal Bau-bar dengan kapasitas 90.000 Kl (prediksi tahun 2008).

Menurut Widya, itu semua merupakan proyek jangka panjang yang disiapkan Pertamina dalam upaya meningkatkan keamanan pasokan BBM. "Pertamina juga masih mempunyai program jangka pendek yang segera dilakukan untuk mengamankan pasokan BBM ini," ucapnya.

Program jangka pendek yang telah direncanakan adalah perubahan dan penyempurnaan pola pasokan BBM untuk mendapatkan alternatif ataupun *back up* yang lebih baik. "Seiring peningkatan kebutuhan BBM nasional dan tidak bertambahnya fasilitas timbun, Pertamina menetapkan *inventory* aman BBM — termasuk kapal — hanya berkisar 24-25 hari konsumsi," kata Widya.

Mengenai stok nasional, Widya membeberkan bahwa setiap daerah tidak dapat disamakan. Di beberapa daerah, katanya, persediaan BBM tidak perlu harus berkisar 23 hari konsumsi karena tingkat kebutuhan di sana tidak sebesar itu. "Di beberapa daerah perbatasan, kita juga tidak akan menyediakan persediaan berlebih karena rawan diselundupkan. Namun secara nasional, memang kebutuhan yang aman berkisar di level 23 hari konsumsi," ujarnya. (Ant/CW-1)

Kontrak ExxonMobil Di Blok Cepu Tak Akan Diperpanjang

JAKARTA (Suara Karya): PT Pertamina tidak akan memperpanjang kontrak ExxonMobil Oil di lapangan minyak dan gas Cepu (Jateng). Itu karena Pertamina berencana mengelola sendiri ladang minyak tersebut. "Minggu ini saya keluarkan surat yang menyatakan Pertamina tidak akan melanjutkan kerja sama dengan pihak ExxonMobil untuk Blok Cepu," kata Dirut Pertamina Widya Purnama dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR di Jakarta, Rabu.

"Untuk itu, doakan saya agar tetap menjadi Dirut Pertamina sehingga kelak Pertamina bisa mengelola sendiri Blok Cepu," ujar Widya. Dia menekankan, mengelola sendiri Blok Cepu sangat menguntungkan negara karena potensinya sangat besar. Bahkan kalau dilakukan dengan baik, bisa-bisa Blok Cepu membuat Pertamina mengalahkan Petronas.

"Kami optimis bisa bawa Pertamina menyaingi Petronas berdasar pertimbangan bahwa potensi cadangan migas kita cukup besar," kata Widya.

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN.RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE: LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HALAMAN: 4											TAHUN 2004																			

Pertamina Tolak Perpanjang Kontrak ExxonMobil di Cepu

JAKARTA, KOMPAS — PT Pertamina sudah memutuskan tak akan memperpanjang kontrak ExxonMobil di Blok Cepu, Jawa Tengah, sebelum berakhir pada tahun 2010. Alasan Pertamina tidak meluluskan keinginan ExxonMobil yang diajukan sejak tahun 2002 itu, karena Blok Cepu diyakini akan mampu menambah produksi minyak dan memberikan keuntungan yang signifikan bagi badan usaha milik negara ini.

Keputusan itu diutarakan Direktur Utama (Dirut) Pertamina Widya Purnama dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi VIII DPR dan Direksi Pertamina yang diwakili Dirut dan Wakil Dirut Mustiko Saleh, Rabu (25/8). ExxonMobil mengajukan perpanjangan kontrak di Blok Cepu sebelum habis masa kontrak tahun 2010, dengan alasan akan menambah investasi untuk meningkatkan produksi dari cadangan yang baru ditemukan.

"Kami akan menyurati pihak ExxonMobil dalam pekan ini mengenai penolakan perpanjangan kontrak tersebut. Pertamina akan mengelola sendiri sumur yang cadangannya relatif besar," ujar Widya.

Tak masalah

Menyinggung biaya eksplora-

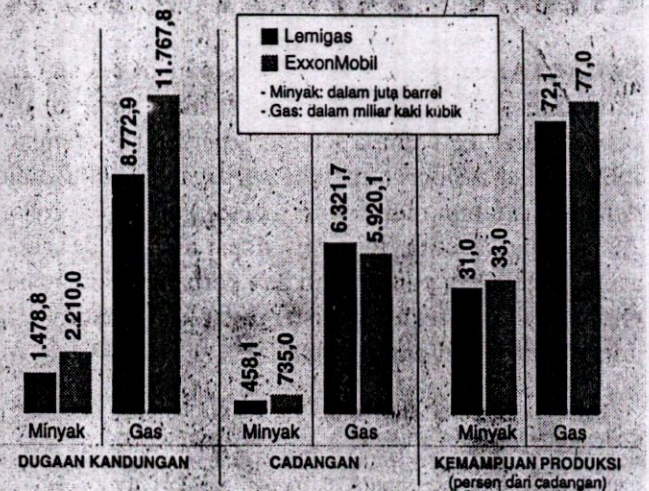
si yang telah dikeluarkan ExxonMobil di Cepu, Mustiko menegaskan, hal itu konsekuensi dari *technical assistance contract* (TAC) di Blok Cepu. ExxonMobil diwajibkan melakukan operasi perminyakan.

Menurut Mustiko, temuan cadangan minyak bisa dieksplorasi hingga kontrak berakhir. Pada tahun 2010 Pertamina akan mengambil alih blok itu.

Mustiko menegaskan, Blok Cepu akan dikelola sendiri tanpa mitra lain. "Kalau bisa untung, kenapa mesti dibagi-bagi kepada pihak lain," ujarnya.

Menyinggung usaha pemerintah meningkatkan produksi minyak dalam negeri, Mustiko mengatakan, Pertamina akan mempersiapkan diri mulai tahun 2007. Dengan demikian, setelah diserahkan, tidak lama akan menambah produksi mi-

KANDUNGAN MIGAS DI BLOK CEPU



nyaknya. Mengenai dana untuk mengelola Blok Cepu, dia mengatakan, banyak tersedia dana dari pihak ketiga. Dia juga menyebutkan, alternatif pembiayaan dalam negeri salah satunya dari Bank Mandiri.

Nyaris diperpanjang

Pada era Dirut Baihaki Hakim, Pertamina mengajukan syarat, penambahan ekuitas Pertamina di proyek tersebut dan bonus tunai jika perpan-

jangan kontrak dilakukan sebelum tahun 2010. ExxonMobil menguasai Cepu melalui anak perusahaannya, Mobil Cepu Limited.

Pada era Dirut Ariffi Nawawi, sebelum diganti Widya Purnama pada tanggal 11 Agustus 2004, Pertamina dan ExxonMobil telah menyelesaikan perundingan. Tinggal menunggu persetujuan komisaris untuk menyetujui pokok-pokok perjanjian. (BOY)

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input checked="" type="checkbox"/> REPUBLIKA <input checked="" type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH FORUM <input type="checkbox"/> INVESTOR IND. <input type="checkbox"/>
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HALAMAN : 1	
TAHUN 2004	

Pertamina Putus Kontrak ExxonMobil di Cepu

JAKARTA — Putus sudah hubungan Pertamina dengan ExxonMobil Indonesia di Cepu. Dirut Pertamina, Widya Purnama, mengatakan perusahaannya tidak akan melanjutkan kerja sama pengelolaan blok minyak dan gas di Cepu dengan Exxon.

Pertamina, kata Widya, lebih memilih untuk mengelola sendiri lapangan yang memiliki cadangan minyak di atas satu miliar barel itu. Selain modal cukup, keuntungan Pertamina jauh lebih besar ketimbang menggandeng perusahaan migas terbesar di dunia itu.

"Pekan ini saya akan mengeluarkan surat yang menyatakan tidak akan melanjutkan kerja sama dengan pihak ExxonMobil," kata Widya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VIII DPR di Jakarta, Rabu (25/8).

Dengan tidak diperpanjangnya kerja sama itu, kon-

trak ExxonMobil akan berakhir pada 2010. Impian Widya, mantan Dirut PT Indosat Tbk, Pertamina bisa menyaingi Petronas. Di awal tahun operasinya, perusahaan migas Malaysia itu banyak belajar dari Pertamina. Se jauh ini, besarnya ca-

dangan minyak di Cepu masih bersifat spekulatif. Menurut Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), cadangan minyak mencapai 1,4 miliar barel dan gas 8,7 triliun kaki kubik.

Sedangkan dari kajian Exxon, potensi minyak di

Cepu sekitar 2,2 miliar barel. Gas sebanyak 11,67 triliun kaki kubik dan yang 5,92 triliun kaki kubik bisa diangkat. Data terakhir Departemen ESDM menyebutkan, ada 400 juta barel minyak yang bisa diproduksi.

Putusnya kerja sama itu seakan menjadi akhir polemik yang berlangsung dalam tiga tahun terakhir ini. Polemik dimulai ketika Exxon meminta kontraknya di Cepu diperpanjang tujuh tahun sebelum berakhir pada 2010. Pertamina menolak, sementara pemerintah lebih moderat.

Pengamat energi, Kurtubi, mengatakan penegasan Widya itu jelas sangat menguntungkan Pertamina. Ini disebabkan karena cadangan migas di Blok Cepu itu sangat besar. Selain itu, Pertamina tidak perlu memberi bagi hasil kepada perusahaan lain dan langsung masuk ke kas negara. ■ has

Ladang Migas Cepu

- **POTENSI** : 2,2 miliar barel minyak (kajian ExxonMobil) 11,67 triliun kaki kubik gas, 5,92 triliun bisa diangkat.
- **KONTRAK** : bentuknya *technical assistance contract* (TAC) dimulai pada 3 Agustus 1990 setelah mengakhiri Humpuss. Kontrak yang berakhir 2010 diperpanjang hingga 2040 pada Februari 2004.
- **PERSOALAN NEGOSIASI** :
 - Exxon minta ladang Cepu dikelola Badan Pelaksana (BP) Migas; Pertamina menolak karena ladang itu milik Pertamina.
 - Setelah 2010, Exxon minta Pertamina memasukkan penyertaan modal. Pertamina menolak, karena tidak mungkin di ladang sendiri menyertakan modal.

■ Sumber: Pusat Data Republika, pengolah: has



HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL **AGST** SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 **26** 27 28 29 30 31

HALAMAN : 13

TAHUN 2004

Pertamina says 'no' to ExxonMobil

The Jakarta Post
Jakarta

State oil and gas company PT Pertamina said on Wednesday it would not extend its contract with U.S.-based ExxonMobil Oil Indonesia Inc. to operate the Cepu oil and gas block, which is believed to contain huge oil and gas reserves.

Pertamina's president Widya Purnama said it was more profitable for Pertamina to operate the block itself rather than with a partner.

"We will send a letter to ExxonMobil on the plan later this week," Widya said in a hearing with House of Representatives Commission VIII on energy, mining and environmental affairs.

Widya did not explain the reason for the decision.

The decision is seen as a setback in the lengthy negotiation between the two companies on

the future of Cepu block which has proven oil reserves of 600 million barrels and trillions of cubic feet of natural gas.

The previous management under Ariffi Nawawi worked hard to clinch a deal with the American firm which culminated in the signing of an initial agreement in March. Under the agreement, the government will receive 60 percent of the block's oil and gas production and the remainder will go to Pertamina and ExxonMobil.

ExxonMobil declined to comment on Pertamina's plan.

"We have yet to receive official notification from Pertamina. So, we can't give any comment," Maman Budiman, Vice President of Public Affairs at ExxonMobil Oil Indonesia Inc. told *The Jakarta Post*.

The Cepu block, located between Central and East Java, is owned by Pertamina. It handed the block over to PT

Humpuss Patragas under a technical assistance contract (TAC) in the early 1990s. The firm was controlled by Hutmomo "Tommy" Mandala Putra, the youngest son of former president Soeharto.

Under the TAC, Humpuss was obliged to give Pertamina a portion of the block's output equal in volume to Pertamina's last production at the block. At the time of the handover to Humpuss, the block only produced a few thousands of barrels of oil per day.

In 1999, Humpuss sold its entire stake in the block to ExxonMobil Cepu.

Upon finding huge oil and gas reserves, ExxonMobil asked for an extension of the TAC which is due in 2010 until 2030.

Pertamina initially wanted to have an equal stake in the block plus hundreds of millions of dollars in compensation.

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE: LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL **AGST** SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 **26** 27 28 29 30 31

HALAMAN: 1

TAHUN 2004

Pertamina kelola sendiri blok Cepu setelah 2010

JAKARTA (Bisnis): Dirut PT Pertamina Widya Purnama menegaskan BUMN itu tidak akan memperpanjang kontrak pengoperasian blok Cepu yang diminta oleh ExxonMobil yang kini bertindak sebagai operator blok migas tersebut hingga 2010.

"Dalam minggu ini kami akan mengeluarkan surat yang berisi tidak akan memperpanjang kontrak pengoperasian blok Cepu yang diminta oleh ExxonMobil," tuturnya di depan Komisi VIII DPR, dalam rapat dengar pendapat umum, kemarin.

Tidak seperti biasanya, jajaran Pertamina hanya dihadiri oleh dirut, wakil dirut, dan *corporate secretary*. Isu yang beredar menyebutkan ketidakhadiran pejabat Pertamina lainnya karena pemboikotan.

Namun, Widya menegaskan ketidakhadiran manajemen Pertamina secara utuh karena mereka sibuk dengan pekerjaan masing-masing.

Menurut dia, keputusan untuk tidak memperpanjang kontrak ExxonMobil ini lebih menguntungkan PT Pertamina. "Keputusan untuk tidak memperpanjang kontrak kami nilai sangat menguntungkan republik ini."

Dirut Pertamina menyatakan di masa datang, BUMN

itu hanya akan menandatangani kontrak dengan perusahaan migas jika terbukti memenuhi tiga kriteria.

Pertama, memberikan keuntungan kepada PT Pertamina. *Kedua*, memberikan keuntungan bagi negara dalam bentuk pajak dan dividen. *Ketiga*, menguntungkan mitra perusahaan.

Wakil Dirut PT Pertamina Mustiko Saleh menambahkan keputusan tersebut juga berdasarkan nilai keekonomisan dari blok Cepu jika dioperasikan PT Pertamina sendiri, dan jika dilakukan oleh ExxonMobil.

"Kalau bagus untuk kami [PT Pertamina] mengapa harus diberikan kepada pihak lain," ujarnya.

Menurut dia, masalah dana yang sudah dikeluarkan ExxonMobil dalam jumlah besar untuk proses eksplorasi merupakan konsekuensi berinvestasi.

Pada pola kontrak bantuan teknis (*technical assistance*

contract/TAC), tuturnya, semua perusahaan migas harus tunduk pada peraturan perminyakan. Hal ini, katanya, sudah ada konsekuensi hukumnya. "Jadi kalau dia tidak *conduct* ya... harus *good bye dong*."

Mustiko menyatakan PT Pertamina mampu mengoperasikan sendiri, sementara soal dana bukan masalah.

"Kami akan berinvestasi dengan dana sendiri. Kalau terpaksa pinjam, di Bank Mandiri kan banyak uang *nganggur*... jadi, pinjam bisa saja. Kami belum tentu pinjam, tapi kalau kami pinjam boleh saja *dong*," katanya.

Dalam kesempatan itu, ketika diminta konfirmasi mengenai tawaran dari Bank of China untuk meminjamkan dana US\$600 juta bagi pengembangan blok Cepu, Widya Purnama mengatakan belum mengetahui hal itu. "Belum tahu... belum tahu. Saya kalau tidak tahu bilang tidak tahu." (*dle/zuf*)

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 2

TAHUN 2004

Pertamina akan Kelola Sendiri Blok Migas Cepu

JAKARTA (Media): PT Pertamina tidak akan melanjutkan kontrak kerja sama bantuan teknis (TAC) dengan ExxonMobil Oil Indonesia Inc (EMOI) untuk pengelolaan blok migas Cepu, Jawa Tengah dan Jawa Timur yang akan berakhir 2010. BUMN migas ini siap mengelola sendiri ladang migas tersebut karena lebih menguntungkan.

"Minggu ini saya akan keluaran surat yang menyatakan tidak akan melanjutkan kerja sama dengan pihak ExxonMobil untuk Blok Cepu," ungkap Direktur Utama Pertamina Widya Purnama, dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VIII

DPR, di Jakarta, kemarin.

Widya berharap tetap menjadi Dirut Pertamina sehingga nantinya bisa mendorong Pertamina mengelola sendiri blok Cepu tersebut.

Dengan mengelola sendiri blok Cepu sangat menguntungkan negara sebab potensinya sangat besar. Bahkan, kalau hal ini dilakukan dengan baik Pertamina bisa mengalahkan perusahaan migas Malaysia, Petronas.

"Ke depan kami optimistis bisa membawa Pertamina menyaingi Petronas dengan didasarkan pertimbangan atas potensi cadangan migas kita cukup besar di sana," kata Widya.

Wakil Dirut Pertamina Mustiko Saleh menambahkan pertambangan direksi baru menolak melanjutkan kerja sama dengan Exxon semata-mata karena faktor ekonomis.

Meski begitu, baik Mustiko, maupun Widya belum menjelaskan detail kerja sama yang tidak akan dilanjutkan itu.

Potensi blok Cepu cukup besar dengan perkiraan produksi 100.000 barel per hari (bph). Inilah yang antara lain membuat Pertamina ingin mengelola sendiri ladang migas tersebut, daripada bekerja sama dengan pihak lain.

Mengenai kekhawatiran Ex-

xon tidak mau melaksanakan eksploitasi di Cepu, Mustiko menjelaskan, dalam kontrak TAC, pihak Exxon sebagai kontraktor Pertamina harus tetap mematuhi ketentuan operasi penambangan migas. Terserah Exxon apakah akan melanjutkan operasi di sana sampai 2010 atau tidak.

"Lewat dari situ kita kelola sendiri dong," jelas Mustiko.

Yang jelas, tiga tahun sebelum kontrak TAC berakhir, pihak Pertamina akan menyiapkan infrastrukturnya terlebih dulu. Secara pendanaan Pertamina kata Mustiko, siap menggunakan dana sendiri yang dapat dikombinasikan dengan pinjaman per-

bankan.

"Kami harapkan dua tahun setelah 2010 Cepu sudah bisa produksi."

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Agusman Effendi mengatakan mendukung upaya Pertamina mengelola sendiri ladang migas Cepu, sepanjang hal itu menguntungkan bagi negara dan Pertamina.

Exxon, perusahaan raksasa migas Amerika Serikat, mulai beroperasi di Cepu pada 1999 melalui Mobil Cepu Ltd. Itu terjadi setelah Exxon mengambil alih 51% saham PT Humpuss Patra Gas yang mendapatkan kontrak TAC selama 20 tahun dari Pertamina pada Agustus 1990 sampai 2010.

Wilayah kerja TAC Cepu merupakan bagian dari wilayah kerja Pertamina Hulu.

Negosiasi kontrak TAC ini berlangsung alot sejak 2001 karena EMOI atau Exxon sempat menyatakan tidak akan melakukan investasi jika kontrak tidak diperpanjang sampai 2030 dan Pertamina mengganti biaya.

Persoalan ini pun sampai dibawa kepada Presiden Megawati Soekarnoputri yang akhirnya memerintahkan Direksi Pertamina terus melakukan negosiasi sepanjang itu menguntungkan bagi negara. (Wis/E-1)

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> KOMPAS <input checked="" type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH FORUM <input type="radio"/> INVESTOR IND. <input type="radio"/>
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HALAMAN : 1	TAHUN 2004

Kontrak Exxon di Cepu Tak Diperpanjang

JAKARTA — PT Pertamina (persero) akhirnya memutuskan tak memperpanjang kontrak kerja sama (*technical assistance contract*) ExxonMobil Oil Indonesia di ladang minyak dan gas Cepu, Bojonegoro, Jawa Timur.

Setelah kontrak berakhir pada 2010, Pertamina akan mengoperasikan sendiri ladang minyak raksasa itu.

Direktur Utama Pertamina Widya Purnama mengatakan, langkah itu merupakan keputusan direksi. "Pertamina akan mengirimkan surat resmi minggu ini," kata Widya di Jakarta kemarin dalam rapat dengan pendapat dengan Komisi Energi dan Sumber Daya Mineral DPR.

Menurut Widya, Pertamina akan mengelola ladang migas yang diperkirakan memiliki kandungan minyak 770 juta hingga 2 miliar barel. "Sebanyak 200-300 ribu barel minyak per hari akan diproduksi dari lapangan itu," katanya.

Pertamina yakin akan memperoleh tambahan pendapatan yang sa-

ngat besar bila produksi bisa segera dijalankan.

Sementara itu, Wakil Direktur Utama Pertamina Mustiko Saleh menegaskan, perusahaan tidak akan mengganti dana investasi yang telah dikeluarkan Exxon selama mengoperasikan blok Cepu, karena itu merupakan konsekuensi kegiatan produksi. Exxon justru tetap diminta memproduksi migas hingga masa kontrak berakhir pada 2010.

Exxon sebelumnya mengklaim telah mengeluarkan investasi sebesar US\$ 475 juta dalam proposal negosiasi perpanjangan kontrak. Dana itu meliputi investasi awal US\$ 400 juta dan investasi pada 2002 sebesar US\$ 75 juta.

Pertamina menilai, investasi yang dikeluarkan itu tidak sebanding dengan kegiatan yang telah dilakukan.

Menurut Mustiko, keputusan tidak memperpanjang kontrak Exxon di Cepu diambil berdasarkan kajian mendalam, terutama mengem-

nai aspek ekonomi. "Ini kan masalah ekonomi saja. Kalau secara ekonomi bagus, kenapa harus kerja sama?" katanya.

Selain itu, keputusan tidak memperpanjang kontrak juga merupakan konsekuensi hukum.

Berdasarkan kesepakatan kerja sama, ExxonMobil di Cepu hanya bertindak sebagai pelaksana operasi minyak (*conduct petroleum operation*). "Kalau tidak *conduct*, ya harus *good bye*," kata Mustiko.

Dengan mengelola sendiri ladang Cepu, Pertamina akan memperoleh keuntungan besar, karena jumlah cadangan yang besar pula. Dari lapangan Banyu Urip, misalnya, bisa dihasilkan minyak sebanyak 170 ribu barel per hari, dan dari lapangan Sukowati 16 ribu barel per hari.

Pertamina menargetkan ladang Cepu bisa mulai diproduksi mulai 2012, setelah masa kontrak Exxon berakhir.

Pertamina membutuhkan waktu sekitar dua tahun untuk mengem-

bangkan lapangan tersebut.

Keputusan Pertamina itu mendapat dukungan penuh dari Komisi Energi DPR. Namun, Wakil Ketua Komisi Pertambangan Agusman Effendi mengingatkan agar Pertamina berhati-hati atas kemungkinan gugatan Exxon ke pengadilan, mengingat proses negosiasi telah dilakukan kedua belah pihak.

Pengamat perminyakan Kurtubi juga setuju Pertamina tidak memperpanjang kontrak Exxon, karena ladang gas Cepu kelak akan memberi keuntungan yang sangat besar. Dengan menjadi milik Pertamina, hasilnya 100 persen akan masuk ke kantong perusahaan.

Dana untuk mengelola ladang migas itu, menurut dia, juga tidak perlu dikhawatirkan, karena banyak yang akan mau membiayai. "Kreditor akan mudah diyakinkan, karena cadangannya sangat besar," kata Kurtubi kepada *Koran Tempo*.

● retro sulistyowati-tmr/dara meutia uning

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input checked="" type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH FORUM <input type="radio"/> INVESTOR IND. <input type="radio"/>										
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL <input type="checkbox"/> UMUM										
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HALAMAN: 1											
											TAHUN 2004

Dirut Pertamina Tolak Perpanjang Kontrak ExxonMobil di Blok Cepu

Jakarta, NERACA - Direktur Utama Pertamina Widya Purnama yang baru saja diangkat (11/8) langsung membuat gebrakan dengan menolak memperpanjang kontrak dengan ExxonMobil di blok Cepu, Jawa Timur. Padahal, kontrak perpanjangan itu sudah siap ditandatangani.

Widya dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Jakarta kemarin menegaskan, Pertamina tidak akan memperpanjang kontrak dengan ExxonMobil Oil Indonesia dalam menggarap lapangan minyak yang berstatus TAC (Technical Assistance Contract) di Cepu itu. Artinya, Exxon harus puas berhenti mengelola Cepu hingga hanya tahun 2010, sementara selebihnya Pertamina akan menanganinya sendiri.

Menurut Widya yang masih berstatus sebagai orang nomor satu PT Indosat itu, keputusan untuk menolak memperpanjang kerjasama TAC dengan ExxonMobil, lantaran Pertamina merasa mampu untuk mengelolanya sendiri. "Pertamina merasa mampu mengelola blok tersebut pasca berakhirnya kontrak pada tahun 2010. Kita menilai dengan mengelola sendiri blok tersebut, perusahaan dan negara akan lebih diuntungkan," tutur pejabat yang

berambisi mengungguli perusahaan migas Malaysia, Petronas sebagai target kepemimpinannya.

Menurut Widya, dalam pekan ini juga Pertamina akan segera mengeluarkan surat keputusannya untuk tidak memperpanjang kerja samanya dengan ExxonMobil di lapangan migas Cepu. Ini berarti perundingan yang telah berlangsung lebih dari tiga tahun itu, cukup sampai di situ.

"Pengelolaan blok Cepu oleh Pertamina merupakan kesempatan emas bagi perusahaan itu untuk mengalahkan Petronas yang merupakan perusahaan minyak Malaysia. Soalnya ini akan menguntungkan Indonesia. Jadi Pertamina akan menggarapnya sendiri," katanya mengungkapkan.

Seperti diketahui, kontrak TAC Pertamina dengan ExxonMobil di blok Cepu akan berakhir pada 2010. Jajaran direksi Pertamina sebelumnya yang dipimpin oleh Ariffi Nawawi sesungguhnya siap

untuk menandatangani kontrak perpanjangan Exxon. Alasannya, Pertamina akan mendapat keuntungan yang jauh lebih besar jika lapangan itu dikembangkan saat ini ketimbang menunggu tahun 2010.

Pertamina memperkirakan blok Cepu dapat memproduksi pertama kali minyaknya pada tahun 2006 sebesar 170 ribu barel per hari. Dengan angka tersebut, perusahaan menurut perhitungan Ariffi dan kawan-kawan, akan lebih mendapat keuntungan karena Pertamina akan mendapat *opportunity loss* US\$ 1,7 juta jika blok Cepu baru akan dikembangkan pasca 2010.

Namun demikian, Ariffi juga mengakui, apabila negosiasi soal pengelolaan Blok Cepu pasca 2010 dengan ExxonMobil gagal, Pertamina akan mengelola sendiri blok tersebut. Dia sendiri mengaku optimistis, Pertamina mampu mengelola lapangan migas itu, kendati pengelolaannya baru bisa dilakukan setelah berakhirnya kontrak TAC dari Exxon 2010.

Kontrak TAC atas Blok Cepu memang berakhir 2010. Namun lantaran di lapangan migas itu ditemukan cadangan yang signifikan, sebelum kontrak itu berakhir ExxonMobil Oil meminta perpanjangan. Alasannya, sebelum bisa dieksplorasi lapangan migas itu perlu dikembangkan dan itu me-

merlukan biaya yang cukup besar, sehingga ExxonMobil minta kontrak diperpanjang supaya biaya yang telah dikeluarkan bisa kembali.

Tetapi belum apa-apa sudah terjadi perbedaan perhitungan. Berdasarkan audit sementara BPKP, biaya investasi yang diakui telah dikeluarkan ExxonMobil atas blok tersebut hanya sekitar US\$ 140 juta. Padahal ExxonMobil mengklaim telah mengeluarkan dana sebesar lebih dari US\$ 400 juta. Karena itu keduanya bernegosiasi dan sepakat untuk melanjutkan audit atas biaya investasi yang telah dikeluarkan itu.

Menurut Ariffi, jika misalnya lapangan tersebut akhirnya dikelola sendiri oleh Pertamina, pelaksanaannya tidak mungkin dapat langsung dilakukan karena butuh 3-4 tahun untuk pengembangan. Jadi, diperkirakan lapangan tersebut itu baru bisa berproduksi tahun 2014 dengan volume hingga 200 ribu barel per hari.

Sedangkan bila Pertamina tetap melakukan kerjasama dengan ExxonMobil, menurut Ariffi, pemerintah bisa menikmati hasil produksinya pada tahun 2004. "Saat ini ExxonMobil sedang berada pada tahap eksplorasi dan produksi baru akan dimulai tahun 2004 ini," demikian Ariffi yang jabatannya diganti Widya pada 11 Agustus 2004 lalu. (31)

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE: LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL **AGST** SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 **26** 27 28 29 30 31

HALAMAN: 4

TAHUN 2004

Harga Minyak Tinggi Perburuk RAPBN 2005

OLEH BACHRAWI SANUSI

WAKIL rakyat yang masa tugasnya segera berakhir baru saja diberi Nota Keuangan dan RAPBN 2005 oleh pemerintah. Tentu saja mudah-mudahan segala rupa angka atas dasar indikator ekonomi yang menghasilkan angka dalam RAPBN 2005 ini bukan sebagai bom waktu. Karena RAPBN 2005 seharusnya dibahas oleh wakil rakyat hasil pemilu yang lalu yang segera akan dilantik.

Penulis menilai, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2005 disusun pada saat keadaan ekonomi dan moneter dunia semakin memburuk. Harga minyak dunia tahun 2005 bahkan seterusnya diramalkan akan melampaui harga 50 dollar AS per barrel.

Bagi Indonesia sepertinya segalanya dianggap ringan, karena begitu mudah untuk menyusun angka RAPBN 2005 atas dasar asumsi yang umumnya sangat ditentukan di luar kemampuan Indonesia. Tetapi, segala asumsi itu berada di tangan pembuat kebijakan ekonomi dan moneter di luar negeri, terutama di negara-negara maju yang juga banyak mengimpor bahan mentah dari Indonesia.

Harga minyak dunia yang semakin meningkat sejak ada niat OPEC mengurangi produksinya sehingga kaum spekulan minyak dunia, terutama dari negara maju, lalu aktif memainkan perannya. Ini ditambah dengan adanya ancaman terhadap ladang-ladang minyak di Arab Saudi dan di Irak. Apalagi lalu ada permainan dalam pemasokan minyak dari perusa-

haan minyak Rusia Yukos yang produksinya 591 juta barrel sampai 1,6 juta barrel per hari lebih. Ini ditambah dengan terjadinya musibah pada pembangkit listrik energi nuklir Jepang dan lain-lain. Semuanya itu makin mempermulus permainan kaum spekulan minyak dunia.

Sejak Mei 2004 kelompok Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) memberikan gambaran suram mengenai dampak harga minyak tinggi bagi ekonomi dan moneter dunia, terutama pertumbuhan ekonomi di berbagai negara maju. Kalau negara maju saja terancam apalagi negara berkembang.

Oleh karena itu, penulis merasa prihatin dengan RAPBN 2005 yang diperkirakan jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (maaf, seperti pos Sedekah) berjumlah Rp 377.886,3 miliar. Jumlah ini terdiri dari Penerimaan Dalam Negeri sebesar Rp 377.136,3 miliar (yang berasal dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp 297.510 miliar dan dari Penerimaan Bukan Pajak sebesar Rp 79.626,3 miliar di mana dari Migas hanya sebesar Rp 47.121,1 miliar).

Jumlah Hibah diperkirakan hanya sebesar Rp 750,0 miliar. Tidak ada satu triliun rupiah, tetapi ditonjolkan, justru BLBI yang lebih dari 150 triliun seperti gas menguap tak terlihat dan lenyap.

Khusus tentang istilah Penerimaan, penulis berpendapat sebaiknya digunakan istilah Pendapatan Dalam Negeri. Karena secara istilah ekonomi ada perbedaan antara Penerimaan atau *Receipt* dan Pendapatan atau *Revenue*. Penerimaan selain pendapatan juga termasuk segala rupa utang, sebagai penerimaan. Justru kerancuan ini kalau melihat RAPBN edisi bahasa Inggris. Dalam RAPBN edisi bahasa Inggris tidak ada tertulis istilah *Receipt*, yang ada adalah *Revenue*. Tetapi, wakil rakyat akan membahasnya dalam edisi bahasa Indonesia.

Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah sebesar Rp 377.886,3 miliar, sedangkan

jumlah Belanja Negara diperkirakan akan mencapai Rp 394.778,5 miliar. Ini berarti RAPBN 2005 terus mengalami defisit Rp 16.892,2 miliar. Dari jumlah belanja negara sebanyak itu, di antaranya akan digunakan untuk pembayaran Bunga Utang Rp 63.986,8 miliar (bunga Utang Luar Negeri Rp 25.142,4 miliar dan Bunga Utang Dalam Negeri Rp 38.884,5 miliar). Pembayaran pokok utang luar negeri sebesar Rp 46.836,5 miliar dan Pembayaran pokok utang dalam negeri Rp 20.914,2 miliar. Jadi jumlah bunga plus cicilan pokok utang dalam dan luar negeri dalam RAPBN 2005 sebesar Rp 131.737,5 miliar atau sekitar 33 persen lebih hanya untuk membayar utang plus bunganya. Layak jika pembangunan nasional akan berjalan di tempat walau pertumbuhan ekonomi ditargetkan 5,4 persen pada tahun 2005. Angka ini mungkin menjadi angka di atas angin, apalagi sekiranya harga minyak dunia tahun 2005 sekitar 50 dollar AS per barrel.

Angka-angka dalam RAPBN 2005 tersebut atas dasar asumsi PDB (produk domestik bruto) Rp 2.190,8 triliun. Penulis perkiraan jumlah ini akan membengkak sekiranya kurs rupiah merosot tajam. Dengan asumsi kurs satu dollar AS sebesar Rp 8.600. Kalau kurs satu dollar AS di atas Rp. 10.000, jelas ini akan menjadikan PDB membengkak. Dengan asumsi harga minyak dipatok 24 dollar AS per barrel, inflasi diperkirakan hanya 5,5 persen. Tetapi, penulis memperkirakan akan lebih besar sekiranya harga minyak dunia sekitar 50 dollar AS per barrel.

Pemerintah mematok harga minyak sebesar 1,125 juta barrel per hari. Tetapi, penulis yakin selama Undang-Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001 masih diberlakukan, produksi minyak bumi Indonesia akan terus menurun. Asumsi lain suku bunga SBI 3 bulan hanya 6,5 persen. Jika inflasi meroket, karena subsidi BBM membubung tinggi, walau harga BBM terpaksa dinaikkan, cara yang gampang

adalah menaikkan suku bunga SBI.

Dampak harga minyak

Negara maju sudah sejak dini membuat proyeksi ekonomi dan moneternya menjadi suram, terutama negara-negara maju kelompok OECD yang jadi pengimpor minyak. Bagi negara berkembang seperti Indonesia yang menurut penulis sejak tahun 2003 sudah menjadi negara *net importir* minyak akan terpukul berat.

Pemerintah pemenang pemilihan presiden putaran kedua akan menghadapi masalah minyak. Pertama, kebutuhan BBM yang terus meningkat. Kedua, harga BBM melonjak tinggi. Ketiga, pemberian subsidi BBM yang berarti defisit APBN semakin besar. Keempat, menaikkan harga BBM yang akan berakibat negatif ganda berbagai biaya produksi, khususnya produk ekspor. Akibatnya besarnya pajak yang diharapkan dalam RAPBN sebesar Rp 297,510 triliun mungkin bakal sulit dicapai. Pengangguran akan melonjak, baik pengangguran dari pendatang baru maupun yang terkena PHK. Kelima, produksi minyak bumi akan terus turun.

Dampak efek ganda negatif karena naiknya harga minyak dunia akan berpengaruh pada besarnya jumlah pajak. Justru RAPBN 2005 sepertinya tertidur dengan angka hasil perpajakan. Besarnya pajak tidak bisa lepas dari hasil usaha perdagangan barang atau jasa, yang akan mengalami grafik naik turun, sesuai baik buruknya ekonomi dan moneter di luar negeri. Karena itu, selayaknya wakil rakyat yang dilantik dan siap membahas RAPBN 2005 berhati-hati karena harga minyak dunia sebagai biang kerok hancurnya ekonomi dan moneter negara-negara *net importir* minyak. Bahan renungan yang memprihatinkan semua pihak, terutama bagi rakyat Indonesia yang terus hidup di bawah garis kemiskinan.

BACHRAWI SANUSI
Lektor Kepala Fakultas Ekonomi dan
Anggota Pusat Kajian Energi dan Sumber
Daya Mineral Universitas Trisakti

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL **AGST** SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 **25** 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 1

TAHUN 2004

Dinilai Bertentangan dengan UUD 1945 MK Didesak Batalkan UU Migas No. 22/2001

Jakarta, Sinar Harapan

Mahkamah Konstitusi (MK) didesak untuk membatalkan atau mengamendemen Undang-Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001. Alasannya, UU Migas tersebut mengandung semangat ekonomi liberal karena bersandar pada persaingan usaha yang bertentangan dengan UUD 1945 yakni ekonomi kerakyatan.

Selain itu UU Migas tersebut terbukti telah menimbulkan ketidakpastian antarinstansi di pemerintahan seperti yang terjadi pada konflik peran dari BP Migas (Badan Pelaksana kegiatan Minyak dan Gas Bumi).

Demikian ditegaskan pengamat migas Ramses O.Hutapea yang dihubungi SH, di Jakarta, Selasa (24/8). "UU Migas menyeraikan mekanisme distribusi ke swasta berdasarkan persaingan yang sehat dan itu berarti ekonomi liberal. Bukankah itu bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 33 yang berlandaskan ekonomi kerakyatan? Kalau sudah begitu, UU Migas itu harus diamendemen," tegas Ramses.

Tuntutan agar UU Migas Nomor 22 Tahun 2001 direvisi dan bahkan dicabut juga disampaikan Forum Solidaritas Masyarakat Peduli Migas (Fortas-MPM). Forum ini, kemarin, mendatangi Mahkamah Konstitusi (MK) di Jalan Medan Merdeka Barat Jakarta, menuntut dicabutnya UU Migas No.22/2001.

Menurut Ramses, dirinya mendesak agar peraturan perundang-undangan bagi kegiatan sektor migas dikembalikan

ke UU Nomor 8/1971. Sebabnya, UU yang lama sesungguhnya cukup akomodatif bagi investasi sektor migas dengan kemungkinan perubahan yang diperlukan.

Kalaupun ada polemik di seputar peran monopoli oleh Pertamina, menurutnya monopoli tersebut adalah monopoli alamiah untuk kepentingan masyarakat banyak.

"Jika nanti berdasarkan UU Migas Nomor 22/2001, distribusi BBM diserahkan ke swasta, saya yakin tidak akan ada investor yang mau mendistribusikan ke pelosok-pelosok Indonesia. Apalagi dengan harga yang seragam seperti yang dijalankan selama ini oleh Pertamina," katanya menambahkan.

Minta Dicabut

Sebelumnya, Fortas-MPM dengan tegas meminta Mahkamah Konstitusi mencabut UU Migas Nomor 22/2001 dari Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 136 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152. Sebabnya, UU tersebut mengancam jaminan pasokan (*security of supply*) dan fungsi agen perubahan (*agent of development*) yang diperankan oleh Pertamina.

Selain itu Fortas-MPM berpendapat, pemerintah telah memberikan keterangan palsu dan menyesatkan rakyat di persidangan Mahkamah Konstitusi atas Perkara Nomor 002/PUU-I/2003 tanggal 29 Juli 2004 di Ruang Sidang Gedung Nusantara IV MPR.

"Oleh karena itu kami minta agar MK menolak semua keterangan maupun penjelasan yang disampaikan Pemerintah melalui Menko Bidang Perekonomian, Menteri Energi dan SDM, serta Meneg BUMN yang telah menyesatkan rakyat. Keterangan dari pemerintah tersebut dianggap bertentangan dengan amanat UUD 1945," ujar Koordinator Fortas-MPM Teddy Syamsuri dalam pernyataan tertulis yang juga ditandatangani oleh sejumlah tokoh antara lain R.Soeprapto, Ketua Umum Dewan Harian Nasional 45, Prof. Dimiyati Hartono, mantan Kasum ABRI Soeyono, dan AR Ramly, mantan Dirut Pertamina.

Kontradiksi

Lebih jauh Ramses menyatakan, UU Migas Nomor 22/2001 terbukti telah menimbulkan ketidakpastian dan konflik antarinstansi. Padahal UU seharusnya memberikan payung kepastian bagi peraturan di bawahnya. Hal ini katanya jelas terlihat dari berlari-larutnya Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) bidang Hulu dan Hilir sebagai pelaksanaan dari UU tersebut, statusnya masih belum jelas. Oleh Sekretariat Negara, RPP tersebut dikembalikan ke Departemen ESDM karena mengandung kontradiksi.

Yang paling mencolok dari kontradiksi yang dikandung oleh UU Migas itu, sebut Ramses, adalah peran dari BP Migas. UU Migas tegas menyatakan BP Migas berstatus Badan Hukum Milik Negara sehingga fungsinya adalah sebagai regulator. Faktanya, BP Migas kini asyik melakukan transaksi jual beli migas seperti blok migas, LNG (Liquified Natural Gas).

"Dirjen Migas menganggap BP Migas adalah badan pemerintah non profit sehingga tidak boleh berbisnis, tetapi kenyataannya tidak demikian. Bahkan kini BP Migas meminta agar aset-aset Pertamina yang terkait dengan Kontraktor Production Sharing (KPS) dijadikan aset BP Migas. Ini bukti UU Migas tersebut justru menimbulkan kesimpangsiuran regulasi," ucap Ramses.

Masalah belum selesai karena UU Migas tidak secara tegas menyatakan bahwa kegiatan eksplorasi migas tidak dikenakan pajak bea masuk. Sementara itu Departemen Keuangan berkalah karena aturan tidak spesifik, maka kegiatan eksplorasi tetap dikenakan bea masuk. Semua itu tegas Ramses, berujung pada produksi minyak Indonesia yang terus menurun bahkan kini kurang dari satu juta barel per hari, jauh di bawah target APBN 2004 sebesar 1,3 juta barel per hari. (rvs)

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH FORUM
 INVESTOR IND.

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL **AGST** SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
HALAMAN : T. 3 TAHUN 2004

Mencari solusi dampak kenaikan harga minyak

Oleh Faisal Baasir

Wakil Ketua Komisi IX DPR-RI

Kenaikan harga minyak dipasar dunia sekarang ini ternyata tidak serta merta membuat perekonomian kita mengalami *booming*, sebagaimana pernah terjadi di era Orde Baru.

Kenaikan harga minyak atau *oil boom* di era 80-an telah mendorong pemerintah untuk melaksanakan modernisasi dalam banyak bidang karena masuknya devisa dari sektor migas.

Namun kenaikan harga migas sekarang ini justru sebaliknya. Para pembuat kebijakan, khususnya di bidang ekonomi seringkali mengatakan bahwa kenaikan harga migas telah membuat sulit kondisi perekonomian atau fiskal (APBN).

Mengapa demikian? Kita sadari bahwa pada era *oil boom*, besar kecilnya subsidi BBM di dalam negeri hanya dipengaruhi oleh naik tidaknya harga minyak dunia yang dinilai dengan dolar AS dan jumlah kebutuhan BBM di dalam negeri.

Selain itu, produksi migas saat ini masih tinggi sementara kebutuhan BBM cukup kecil.

Namun sekarang ini, besar kecilnya subsidi BBM bukan hanya karena naik turunnya harga minyak di

pasaran dunia yang diukur dengan dolar AS atau besar kecilnya jumlah BBM yang dibutuhkan, tetapi juga bagaimana dengan kurs rupiah terutama terhadap dolar AS.

Sementara itu, untuk memproduksi BBM sebagian besar masih menggunakan komponen impor yang juga terpengaruh oleh dollar AS. Oleh sebab itu, jika harga minyak dunia naik, biaya impor komponen BBM juga naik.

Sementara harga BBM didalam negeri yang disubsidi harganya tidak naik. Dengan demikian biaya subsidi yang dikeluarkan pemerintah untuk BBM juga harus naik.

Dengan demikian, defisit APBN juga akan naik. Pada sisi lain, produksi migas sekarang ini justru terus merosot sementara penggunaan BBM terus meningkat.

Merosotnya ekspor migas disebabkan karena kapasitas produksi yang terus menurun. Produksi minyak Indonesia terbesar terjadi pada 1977 yang mencapai 1,7 juta barrel per hari (bph).

Angka tersebut kemudian menurun hingga 1,250 juta bph pada 1982. Selanjutnya, produksi cenderung meningkat hingga kurun waktu 1994-1996 dengan produksi rata-rata mencapai 1,6 juta bph.

Akan tetapi, setelah 1997 produksi minyak menurun terus menjadi 1,55 juta bph pada 1998, 1,4 juta bph pada 2000, 1,3 juta bph pada 2001, 1,2 juta bph pada 2002, sekitar 1,1 juta bph pada 2003, dan pada 2004 ditargetkan hanya mencapai 1,125 juta bph.

Mengatasi kendala

Disadari bahwa peran migas da-

lam perekonomian akan terus menurun dan segera digantikan oleh peran pajak.

Meskipun demikian, sumbangan migas untuk perekonomian diharapkan juga bisa memberikan manfaat optimal bagi perekonomian. Alasannya cadangan migas kita cukup besar, hanya saja pengembangannya tidak dilakukan dengan baik dan optimal.

Hal ini misalnya bisa dilihat dari realisasi rencana pengeboran eksplorasi dan eksploitasi kegiatan pertambangan minyak dan gas pada 2004 masih sangat rendah.

Dari data Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Migas, untuk kegiatan eksplorasi hingga saat ini baru sebanyak 19 sumur atau 16,66% dari 114 sumur eksplorasi yang direalisasikan.

Untuk kegiatan eksploitasi, baru 504 sumur atau 47,14% dari 1.069 sumur yang direalisasikan.

Sejak 2000 rencana pengeboran sumur tak pernah berhasil direalisasikan 100%.

Penyebab rendahnya realisasi pengeboran sumur eksplorasi dan eksploitasi migas selama 2004 adalah karena kendala di lapangan. Terutama pada sumur minyak di darat yang sering mengalami kesulitan dalam membebaskan tanah penduduk.

Dari kegiatan pengeboran selama ini, pada 2004 ditemukan dua lapangan migas baru, yakni di blok Jabung di Jambi milik Petro China dan blok Pangkah di Pulau Jawa milik Amerada Hess. Namun, saat ini masih dilakukan survei mengenai detail jumlah cadangannya.

Asumsi dasar APBN 2004 dan RAPBN 2005			
Indikator Makro	2004		2005 RAPBN
	APBN	Perkiraan Realisasi	
1. Produk domestik bruto (Rp triliun)	1.999,7	1.990,3	2.190,8
2. Pertumbuhan ekonomi tahunan (%)	4,8	4,8	5,4
3. Inflasi (% , y-o-y)	6,5	7,0	5,5
4. Nilai tukar rupiah per US\$	8.600	8.900	8.600
5. Suku bunga SBI 3 Bulan (%)	8,5	7,6	6,5
6. Harga minyak internasional (US\$/barel)	22,0	36,0*	24,0
7. Produksi minyak Indonesia (juta barel/hari)	1,150	1.072	1.125

Sumber: Nota Keuangan dan RAPBN 2005.

Ket: * = Berdasarkan revisi atas APBN yang dituangkan dalam APBN-P 2004.

Penemuan cadangan minyak yang baru ditemukan tahun ini akan diproduksi tiga tahun mendatang. Jadi, pada saat nanti volume produksi minyak Indonesia sudah mendapat tambahan.

Namun, temuan cadangan dan produksi gas justru semakin besar.

Pada tahun ini cadangan gas terbukti mencapai 90,30 triliun kaki kubik (TCF) dan cadangan potensial mencapai 86,29 TCF.

BP Migas menargetkan penerimaan negara dari sektor migas pada 2004 sekitar US\$11,3 juta. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan 2003 sebesar US\$10,5 juta.

Efisiensi BBM

Karena bangsa Indonesia akan menghadapi jumlah pengadaan BBM di dalam negeri yang langka, dan harga BBM akan terpaksa dinaikkan, selayaknya sejak pagi pemerintah mencari jalan keluar yang cepat dan tepat serta efisien.

Tentu dengan bekerja sama dengan para gubernur, khususnya dalam hal upaya pemerintah daerah yang sudah otonom itu agar semakin memperbanyak angkutan umum yang berbahan bakar bukan BBM, misalnya berbahan bakar gas bumi yang agak ramah dengan lingkungan.

Jika harga minyak dunia akan terus naik, pemerintah akhirnya semakin banyak mengeluarkan subsidi BBM, dan defisit anggaran yang semakin menggunung.

Kebijakan diversifikasi serta konservasi penggunaan energi khususnya BBM harus dilaksanakan secara benar. Bahkan perlu pula dipikirkan kemungkinan pemerintah daerah untuk segera menyediakan jalan-jalan khusus untuk sepeda.

Selain meningkatkan produksi migas, upaya lain yang bisa dilakukan adalah efisiensi penggunaan BBM. Selama ini konsumsi BBM kita termasuk cukup tinggi sementara harganya masih disubsidi oleh pemerintah.

Untuk mengurangi tekanan besarnya subsidi, penggunaan BBM perlu dilakukan secara efisien atau menggunakan bahan alternatif seperti gas bumi yang lebih ramah lingkungan.

Jika harga minyak dunia akan terus naik, pemerintah akhirnya semakin banyak mengeluarkan subsidi BBM, dan defisit anggaran yang semakin menggunung. Kebijakan diversifikasi serta konservasi penggunaan energi khususnya BBM harus dilaksanakan secara benar.

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
- KORAN J

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL **AGST** SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 **24** 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 6

TAHUN 2004

Pemerintah Dapat Tuntut Balik KBC

Jakarta, Koran5

Pemerintah diyakini tidak perlu membayar bahkan bisa menuntut balik Kara-ha Bodas Company (KBC) dalam kasus proyek KBC. Kasus itu terkait dengan dugaan penggelembungan (*mark up*) nilai investasi dan pencemaran nama baik. Tak hanya itu, tapi pemerintah juga diyakini dapat menuntut denda kepada perusahaan tersebut.

"Kami bisa hukum mereka, apalagi kalau ternyata ada *mark up* nilai investasi dalam proyek KBC. Soalnya, *mark up* merupakan tindakan korupsi," ujar pengamat perminyakan, Ramses Hutapea, di Jakarta, Senin (23/8).

Pemerintah, menurut Ramses, juga harus berusaha untuk memaparkan temuan korupsi tersebut untuk membuktikan klaim KBC senilai US\$299 juta tidak layak dibayar. Selain itu, agar temuan korupsi bisa mengikat secara internasional, perlu diperiksa ulang oleh akuntan independen.

"Temuan korupsi itu harus dilaporkan ke US Foreign Anti Corruption Act supaya klaim tidak usah dibayar karena ada indikasi korupsi," ujar Ramses.

Selain itu, tambah Ramses, pengadilan Indonesia harus menindaklanjutinya dengan menghukum KBC melalui ganti

rugi yang dilakukan KBC kepada Pertamina. "Jadi, tindakan Pertamina yang menolak membayar klaim tersebut merupakan langkah yang tepat," tandas Ramses. ANR

23

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE: LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 6

TAHUN 2004

DPR Desak Polisi Usut Dugaan Korupsi Proyek Karaha

"Uang negara tidak akan disita bila bukti disampaikan ke Interpol."

JAKARTA — Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat mendukung sikap Pertamina untuk tidak membayar klaim kepada Karaha Bódas Company. Mereka juga mendesak agar kepolisian mengintensifkan penyelidikan terhadap dugaan korupsi dalam proyek pengembangan listrik panas bumi di Karaha, Jawa Barat, itu.

Menurut Wakil Ketua Komisi Energi Agusman Effendi, anggota Dewan telah berulang-ulang menyatakan ketidaksetujuan kepada pemerintah dan Pertamina—masa direksi lama—yang sebelumnya cenderung akan membayar klaim itu. Bahkan Panitia Khusus DPR yang pernah dibentuk Komisi Energi telah melaporkan kasus Karaha ke Kejaksaan Agung.

"Laporan itu telah kami sam-

paikan beberapa waktu lalu," kata Agusman saat membacakan kesimpulan rapat dengar pendapat dengan Pertamina kemarin.

Anggota Komisi Energi, Agus melanjutkan, menyambut baik sikap direksi baru Pertamina saat ini yang belum bersedia membayar klaim karena menunggu hasil penyelidikan dugaan korupsi di Karaha. Dalam waktu dekat, Komisi Energi akan memanggil kepolisian untuk menjelaskan penyelidikan dugaan korupsi di proyek Karaha.

"Kami akan meminta kepolisian menjelaskan perkembangan penyelidikan," kata Agusman saat membacakan kesimpulan rapat dengar pendapat dengan Pertamina kemarin.

Pada kesempatan itu, Direktur Utama Pertamina Widya Pur-

nama menegaskan kembali bahwa Pertamina tidak akan membayar hingga ada pembuktian dari kepolisian mengenai dugaan korupsi dalam proyek itu.

Widya menjelaskan, semula Pertamina memang bermaksud membayar klaim Karaha, karena kalah dalam pengadilan tingkat banding di New Orleans, Amerika Serikat. Namun, belakangan pemerintah menginginkan klaim itu tidak dibayar hingga dugaan korupsi itu dapat dibuktikan.

Menurut Widya, Pertamina telah mendesak kepolisian agar segera melaporkan hasil penyelidikan kepada Interpol. Jika bukti itu dilaporkan ke Interpol, uang pemerintah yang ditahan di Amerika akan bisa diselamatkan. "Uang negara berpeluang

jemilikan 10 persen.

Pemerintah sempat meneruskan proyek ini dua bulan setelah penghentian itu. Namun, beberapa bulan kemudian proyek ini kembali dihentikan. Merasa dijemainkan, pengembang mengajukan tuntutan ke arbitrase internasional. Pemerintah kalah dan diharuskan membayar klaim kepada Karaha.

Nilai klaim mencapai US\$ 299 juta. Itu terdiri atas investasi proyek US\$ 111 juta dan kehilangan keuntungan selama 30 tahun US\$ 150 juta ditambah bunga selama sengketa diperkarakan. Namun, berdasarkan penilaian independen dari Italia, nilai proyek ini ternyata tidak lebih dari US\$ 50 juta.

Anggota Komisi Energi dari Iraksi PDIP Didik Supriyanto

tidak akan disita (kalau dilaporkan ke Interpol)," ujarnya.

Bukti dari kepolisian memang sangat berguna bagi Pertamina. Sebab, jika tindak pidana korupsi di proyek Karaha terbukti, Pertamina akan menggunakannya sebagai bukti baru dalam persidangan tingkat kasasi di Amerika Serikat, Oktober mendatang.

Sengketa antara Pertamina dan Karaha bermula ketika pemerintah secara sepihak menghentikan proyek itu akibat krisis moneter pada 1997. Pemegang saham Karaha terdiri dari Florida Power & Light (40,5 persen), Caithness Energy LLC (40,5 per-

mendesak agar Komisi Energi segera mengirim surat kepada Komisi II untuk meminta kepolisian segera mengirimkan laporan ke Interpol. "Agar tugas Dirut Pertamina semakin ringan," kata dia. Dia juga meminta agar DPR mendesak kepolisian mengintensifkan penyelidikan terhadap dugaan korupsi.

Dukungan serupa juga datang dari fraksi lainnya. Zulkifli Hamid dari Fraksi Reformasi mengingatkan agar Pertamina konsisten. "Kami berharap Dirut Pertamina tidak mudah dipatahkan," ujarnya. Sementara itu, Cecep Rukmana dari Fraksi Reformasi juga menekankan agar langkah-langkah Pertamina dalam kasus Karaha diawasi. "Kalau tidak hati-hati, bisa kalah lagi," ujarnya. ● dara meutia uning

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH FORUM
 INVESTOR IND.

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL **AGST** SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 **26** 27 28 29 30 31

HALAMAN : 1

TAHUN 2004

BI: Perubahan Asumsi Harga Minyak Tidak Pengaruhi Target Inflasi

Jakarta, NERACA

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Aslim Tadjuddin mengatakan, BI meyakini asumsi harga minyak sebesar US\$ 36 per barel dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2004 yang mengakibatkan subsidi membengkak hingga Rp 63 triliun, tidak akan memberi dampak yang besar terhadap inflasi. Pasalnya, selain sebagai pengimpor minyak, Indonesia juga mengekspor minyak sehingga masih memperoleh keuntungan dari kenaikan harga minyak dunia.

"Bagi kita dampak kenaikan harga minyak itu bisa *fifty-fifty*, karena kita kan juga mengekspor. Jadi ada berkahnya juga," kata Aslim sesuai rapat dengan Panitia Anggaran di gedung DPR/MPR Jakarta, Selasa (24/8).

Dikatakan, kenaikan harga minyak terutama akan memberi dampak yang sangat besar kepada negara-negara yang murni menjadi importir minyak seperti Jepang dan Amerika Serikat. "Meskipun Indonesia sebagai net importir, kondisi tersebut tidak berlaku sepanjang tahun. Mungkin bulan ini

memang net importir, tapi kan bulan depan belum tentu."

Menurut Aslim, mencermati kenaikan harga minyak tersebut BI juga akan memperhatikan perkembangan ekonomi global. Selain itu, BI juga akan disiplin dan konsisten melaksanakan kebijakan moneter yang saat ini dilakukan secara tight bias.

Mengenai asumsi seperti inflasi 7% dan nilai tukar rupiah 8.900 per dollar AS, dalam pandangan Aslim, sudah memperhitungkan faktor asumsi harga minyak sebesar US\$ 36 per barel. Khusus untuk rupiah, Aslim meyakini target kurs 8.900 per dolar hingga akhir tahun ini akan tercapai, jika pemilu berjalan lancar yang pada akhirnya berdampak pada penguatan rupiah.

Penurunan SBI

Pada kesempatan itu Aslim mengatakan, kenaikan tingkat suku bunga The Fed membuat ruang bagi penurunan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) menjadi terbatas. Namun BI meyakini tingkat suku bunga sekarang ini masih sangat kondusif untuk perkembangan sektor riil.

"Kenaikan suku bunga The Fed memberi pengaruh ke seluruh dunia. Kita jadi ada tantangan. Ruang kita untuk membawa penruuna suku juga terbatas tapi kita percaya suku bunga sekarang masih kondusif untuk perkembangan sektor riil."

Diakuinya, suku bunga FASBI (Fasilitas Bank Indonesia) sekarang ini masih sangat tinggi dibandingkan dengan The Fed yakni untuk FASBI 1 hari mencapai 7%, sementara The Fed tingkat suku bunga hanya 1,5%.

Aslim meyakini target inflasi 7% pada tahun ini bisa tercapai namun dengan catatan suplai tetap terjaga dan nilai tukar rupiah stabil. "Karena inflasi kita kan lebih banyak dari suplai atau *cost push inflation* bukan dari demand poll. Kalau suplai terjaga dan dampak *cost push* dihindari saya yakin bisa mencapai target itu," katanya.

Diakuinya meskipun pada masa lebaran ada tekanan, namun jika suplai terjaga maka inflasi masih aman. Dia melihat kecenderungan inflasi sekarang ini sudah turun dimana pada Mei tercatat 0,9%, Juni 0,6% dan sekarang hanya 0,3%. (* / 15)

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 9

TAHUN 2004

■ Distribusi Minyak

Pertamina Pindahkan Titik Distribusi untuk Atasi Kelangkaan Minyak di Kalteng

Sampit, NERACA

Pertamina akan memindahkan titik distribusi dari Kota baru Kalimantan Selatan ke Muara Sungai Mentaya Sampit awal September mendatang, guna memperlancar distribusi dan mengantisipasi terjadinya kelangkaan BBM di wilayah Kalimantan Tengah.

Kepala Pertamina Sampit Slamet Sumarso di Sampit, Rabu (25/8), mengatakan Pertamina telah melakukan pengkajian sebelum memindahkan titik distribusi BBM dari Kota Baru ke Sampit dengan tujuan agar tidak ada lagi keterlambatan pasokan untuk ke sejumlah daerah di Kalimantan Tengah, seperti yang terjadi belakangan ini yang dinilai menjadi salah satu penyebab kelangkaan BBM. Untuk itu pada awal September mendatang akan datang kapal tanker besar membawa 35.000 kilo liter BBM jenis solar dan minyak tanah ke Sampit.

Tanker ini, tulis *Antara*, akan ditambat di Muara Mentaya karena tanker tidak bisa masuk kepelabuhan milik Pertamina Sampit karena Muara Mentaya sangat sempit.

Menurut dia, BBM yang dibawa tanker besar ini akan dibagi untuk tiga depot, yaitu Depot Sampit, Pulang Pisau dan depot Pangkalan Bun. Adapun kebutuhan BBM jenis solar, bensin dan premium untuk depo Sampit yang meliputi tiga kabupaten, yaitu Kotim, Seruyan dan Katingan sebanyak 18.000 kilo liter per bulan.

Namun, menurut Slamet pihaknya belum mengetahui berapa besar kebutuhan untuk perkebunan dan industri pada tiga kabupaten karena masih dilakukan pendataan. Sementara, saat ini sudah ada puluhan perkebunan dan industri kayu yang mendaftar ke Pertamina Sampit untuk mendapatkan pasokan solar.

Pedagang eceran protes

Di pihak lain, sebanyak 20 orang pedagang eceran bahan bakar minyak (BBM) mendatangi Kantor Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Kalimantan Tengah untuk memprotes adanya larangan bagi mereka untuk membeli BBM di SPBU terkait adanya kelangkaan solar sejak dua bulan terakhir.

Puluhan pedagang eceran yang berasal dari Kelurahan Mentawa Baru Ketapang, Sungai Sampit dan Kota Besi itu datang mengenderai sepeda motor secara berombongan setelah sebelumnya mendatangi Pertamina Sampit dan pemilik SPBU pada Selasa (24/8).

Sejumlah pedagang eceran BBM ini mengaku sudah lebih sebulan ini mereka tidak lagi berdagang BBM karena SPBU di Sampit tak mau lagi melayani pedagang pengecer BBM dan para pedagang pun takut mengantri ke SPBU karena takut ditangkap polisi.

Puluhan pedagang itu juga menyampaikan aspirasi dengan mendatangi gedung DPRD Kotim, namun belum ada tanggapan dari DPRD Kotim karena belum terbentuknya unsur pimpinan di DPRD Kotim. Pedagang ini diterima Kabag Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Kotim Drs Yusuf Sulaiman.

"Kami ini pedagang kecil yang menjual BBM untuk menyambung hidup, bukan untuk diselewengkan, masa kami juga dituding sebagai penyebab kelangkaan solar," kata pengecer minyak. (34)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL **AGST** SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 **26** 27 28 29 30 31

HALAMAN: 5

TAHUN 2004

"Tahun Depan Harga Minyak Dunia Kembali Normal"

Kendati harga minyak mentah dunia tahun ini sempat menyentuh US\$ 50 per barel, Menteri Keuangan Boediono memperkirakan harga minyak dunia tahun depan akan kembali turun pada level yang lebih normal. Alasannya, lonjakan harga minyak yang gila-gilaan ini kalau terus berlangsung akan memberi tekanan bagi pertumbuhan ekonomi dunia. Dengan demikian, ekonomi global berjalan melambat.

Bahkan, kata dia, kalau tidak hati-hati bisa menuju ke jurang resesi. "Karena kalau pertumbuhan turun, permintaan akan minyak juga turun," kata Boediono. Jadi, untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi global dan menstabilkan permintaan akan minyak mentah, harga minyak harus di level yang normal.

Menurut Boediono, faktor lainnya adalah aspek psikologis yang membayangi harga minyak melambung tinggi akan hilang. Aspek psikologis yang dimaksud, yaitu suasana yang penuh ketidakpastian akibat perang Irak, persetujuan pemerintah Rusia dengan Yugos (Pertaminanya Rusia), referendum Venezuela, dan pemilihan presiden di Amerika Serikat.

"Karena ketidakpastian itu, orang-orang memesan minyak yang banyak untuk berjaga-jaga sehingga harga minyak naik agak gila-gilaan," ujarnya. Tapi, Boediono menambahkan, situasi Irak mulai berangsur-angsur baik, referendum Venezuela juga berlangsung baik serta permasalahan pemerintah Rusia dan Yugos mulai mencapai titik terang.

Dia menambahkan, penurunan harga minyak tahun depan dapat direspons oleh pemerintah baru. Maka, harga minyak tidak sebesar seperti yang dipatok dalam APBN 2004. Perkiraan Boediono tidak akan terlalu meleset dari target RAPBN 2005 US\$ 24 per barel. "Penyesuaiannya bisa dilakukan secara gradual sesuai dengan situasi politik dan ekonomi saat itu," kata dia. ● kurniawan

27

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input checked="" type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH FORUM <input type="radio"/> INVESTOR IND. <input type="radio"/>
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
HALAMAN : 14	TAHUN 2004

Kereta Pengangkut BBM Terguling

TIGA dari 16 rangkaian kereta api yang mengangkut tangki bermuatan bahan bakar minyak (BBM) jenis minyak tanah terguling di sekitar lokasi Stasiun Balapan, Solo, kemarin.

Kereta yang dikendalikan oleh dua masinis, Wijayadi dan Awang ini terguling, saat perjalanan dari Stasiun Rewulu, Yogyakarta menuju Madiun, Jawa Timur.

Tiga tangki (tangki enam, tujuh, dan delapan) yang terguling itu membawa minyak tanah 81.000 liter. Sebagian dari minyak tanah itu tumpah, dan sebagian lagi bisa diselamatkan, ditampung dalam drum-drum.

Kepala Kesatuan Pelayanan Masyarakat Polresta Surakarta, Inspektur Dua (Ipda) Dwi Haryadi di tempat kejadian mengatakan, dalam musibah ini pihaknya belum bisa memberikan keterangan, karena masih dalam penyelidikan. (WJ/Ant/N-1)

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL **AGST** SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 **25** 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 4

TAHUN 2004

Revisi Harga Minyak Tak Berdampak ke Inflasi

JAKARTA - Perubahan asumsi harga minyak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2004 tidak akan memberikan dampak yang signifikan terhadap kenaikan inflasi. Sebab, kenaikan harga minyak selain menambah besarnya subsidi bahan bakar minyak (BBM), di sisi lain juga mendapatkan keuntungan (*windfall profit*) dari hasil penjualan minyak mentah.

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Aslim Tadjuddin, se usai mengikuti rapat kerja antara pemerintah dengan panitia anggaran DPR di Jakarta, Selasa (24/8) mengatakan, asumsi harga minyak dalam APBN-P yang diusulkan pemerintah dari US\$ 22 per barel menjadi US\$ 36 per barel, memang akan

mengakibatkan kenaikan subsidi menjadi Rp 63 triliun.

Namun, di sisi lain Indonesia sebagai pengekspor minyak juga meraih keuntungan. Minyak mentah yang diekspor dibeli dengan harga relatif tinggi.

Menurut Aslim, negara-negara yang sangat merasakan dampak kenaikan harga minyak adalah negara-negara importir minyak seperti Jepang dan Amerika Serikat (AS). Sedangkan Indonesia akan mengalami dampak yang tidak terlalu signifikan.

Indonesia jelas Aslim, sekalipun dinilai sebagai *net importir*, namun kondisi ini tidak akan berlaku sepanjang tahun. Untuk bulan ini bisa dikategorikan sebagai *net importir*, tetapi bulan depan belum tentu demikian.

Seiring fluktuasi harga

minyak, BI akan tetap memperhatikan perkembangan ekonomi global dengan disiplin. Selain itu konsisten melaksanakan kebijakan moneter yang saat ini dilakukan secara ketat tetapi tidak kaku (*tight bias*), jelasnya.

Mengenai asumsi inflasi 7 persen dan nilai tukar rupiah pada kisaran Rp 8.900 per dolar AS, sudah memperhitungkan faktor asumsi harga minyak sebesar US\$ 36 per barel. Khusus untuk rupiah, Aslim meyakini target sebesar Rp 8.900 per dolar hingga akhir tahun ini akan tercapai, jika pemilu berjalan lancar yang pada akhirnya berdampak pada penguatan rupiah.

"Kita sudah mencoba beberapa skenario dan Rp 8.900 itu rata-rata dari Januari hingga akhir tahun, meskipun dalam lima bulan terakhir ru-

piah berada di kisaran Rp 8.900-9.000 per dolar AS, tetapi secara rata-rata masih di bawah Rp 8.900 per dolar AS," kata Aslim.

Menteri Keuangan Boediono, dalam rapat kerja tersebut, menyampaikan, harga minyak sebesar US\$ 36 per barel dalam APBN-P 2004 mengakibatkan subsidi BBM menjadi Rp 63 triliun dari sebelumnya yang dianggarkan dalam APBN 2004 sebesar Rp 14,6 triliun.

Dengan besaran subsidi sebesar Rp 63 triliun, defisit anggaran sedikit lebih besar di atas target semula yakni menjadi 1,3 persen dari PDB dibanding target sebelumnya 1,2 persen. Untuk menutup defisit, pemerintah sudah memiliki sumber dana seperti setoran BPPN, penjualan aset Perusahaan Pengelola Aset (PPA), divestasi perusahaan BUMN, dan penerbitan surat utang negara (SUN) yang akan diupayakan bisa mencapai target yang ditetapkan sebesar Rp 32,5 triliun tahun ini.

Asumsi makro lainnya dalam APBN-P yakni pertumbuhan ekonomi ditetapkan 4,8 persen, sekalipun pada semester I realisasinya hanya 4,5 persen, inflasi 7 persen, nilai tukar rupiah Rp 8.900 per US\$ dolar AS dan produksi minyak 1,072 juta barel per hari.

Menkeu dalam kesempatan itu juga menyampaikan, untuk pinjaman program pada semester I belum ada yang ditarik karena masih ada sejumlah persyaratan yang belum bisa dipenuhi oleh pemerintah seperti yang ditetapkan oleh negara-negara kreditor. (B-15)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
- KORANJ

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
HALAMAN : 6 TAHUN 2004

**Produksi Gas 2005
Diperkirakan Meningkat**

Jakarta, Koran5

Pemerintah memperkirakan produksi gas pada 2005 meningkat menjadi 10 miliar kaki kubik per hari (BCFD) daripada tahun ini yang hanya 9,5 BCFD.

Peningkatan itu diperkirakan diperoleh dari pengembangan la-

pangan gas bumi di berbagai daerah, seperti di Jawa Timur, Sumatera Selatan, dan Jambi.

Peningkatan produksi gas sudah beberapa tahun mengalami kenaikan dari sekitar 7,3 BCFD pada 2002 meningkat menjadi 8,8 BCFD pada 2003.

Tren peningkatan tersebut diperkirakan masih berlanjut pada tahun mendatang seiring akan dioperasikannya lapangan gas, seperti di Papua, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Tengah.

Demikian paparan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dalam siaran pers, Selasa (24/8).

Disebutkan, dari sisi minyak bumi, terdapat tambahan cadangan minyak bumi 1 miliar barel dan cadangan gas bumi meningkat dari 123,6 triliun standar kaki kubik (TSCF) menjadi 178,13 TSCF.

Penurunan produksi minyak dari lapangan rata-rata mencapai 15% per tahun masih dapat diimbangi dengan upaya-upaya optimalisasi.

Pada 2003 berhasil ditandatangani 15 kontrak kerja sama migas. Tahun ini diharapkan dapat ditandatangani 27 kontrak kerja sama migas. (RUF)

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input checked="" type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH FORUM <input type="checkbox"/> INVESTOR IND. <input type="checkbox"/>
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HALAMAN : 4	
TAHUN 2004	

Asumsi Harga Minyak di APBN 2004 Menjadi US\$ 36 Per Barel

Jakarta, Sinar Harapan

Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2004 dipastikan akan bertambah menyusul harga minyak dunia yang melambung tinggi. Pemerintah mengubah besaran defisit APBN 2004 dari 1,2 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau Rp 24,41 triliun menjadi 1,3 persen PDB atau Rp 26,27 triliun pada APBN Perubahan. "Defisit diubah sedikit di atas yang ditetapkan sebelumnya yaitu sekitar 1,3 persen," kata Menteri Keuangan Budiono usai mengikuti Rapat Paripurna DPR, Selasa (24/8).

Bertambahnya besaran defisit tersebut, kata Boediono, lebih disebabkan berubahnya asumsi harga minyak dari semula US\$ 22 per barel menjadi US\$ 36 per barel di APBN Perubahan. Akibat kenaikan asumsi harga minyak tersebut, subsidi bahan bakar minyak (BBM) juga berubah dari Rp 14,6 triliun menjadi Rp 63 triliun.

Menurut Boediono, meski defisit meningkat namun pemerintah sudah mencari sumber untuk menutupi dengan meningkatkan penerimaan perpajakan dari penjualan aset di Perusahaan Penjualan Aset (PPA) dan setoran Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Penerbitan Surat Utang Negara (SUN) juga kita upayakan untuk mencapai sasaran sesuai rencana Rp 32,5 triliun.

"Tapi yang jelas defisit itu bisa ditutup secara penuh. Beberapa hal termasuk dari penjualan aset PPA, dari setoran BPPN, dan SUN yang diharapkan sesuai rencana tahun ini," tegasnya.

Ditambahkan, asumsi dasar APBN 2004 yang lainnya juga berubah yaitu inflasi dari 6,5 persen menjadi 7,0 persen, nilai tukar rupiah dari Rp 8.600 menjadi Rp 8.900 per US\$. Sertifikat Bank Indonesia (3 bulan) berubah dari 8,5 persen menjadi 7,6 persen, produksi minyak dari

1,15 juta barel per hari menjadi 1,07 juta barel per hari, sedangkan target pertumbuhan ekonomi tetap 4,8 persen.

Sedangkan Kepala Badan Analisa Fiskal Depkeu, Anggito Abimanyu menambahkan, meski defisit APBN meningkat namun kemampuan anggaran untuk menutupi dampak kenaikan harga minyak sudah diperhitungkan, antara lain dengan meningkatkan penerimaan pajak dan penerimaan non pajak.

Realisasi Semester I/2004

Sementara dalam rapat kerja dengan Panitia Anggaran DPR, Menteri Keuangan menyampaikan realisasi APBN 2004 semester I/2004. Disebutkan suku bunga SBI 3 bulan juga cenderung turun hingga mencapai rata-rata 7,49 persen, yang berarti lebih rendah dari yang diasumsikan dalam APBN 2004 sebesar 8,5 persen. Selanjutnya, rata-rata nilai tukar Rupiah selama semester I 2004, mencapai Rp 8.735/US\$, sedikit lebih tinggi dibandingkan yang diasumsikan dalam APBN 2004 sebesar Rp 8.600/US\$.

Demikian pula laju inflasi dalam semester I 2004 secara kumulatif mencapai 6,83 persen, sedikit lebih tinggi dari yang diperkirakan dalam APBN 2004 sebesar 6,5 persen. Sementara itu, realisasi harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP) selama semester I 2004 mencapai US\$ 32,67 per barel, lebih tinggi dibandingkan dengan asumsi dalam APBN 2004 sebesar US\$ 22,0 per barel.

Di pihak lain, realisasi produksi minyak mentah Indonesia dalam semester I 2004 diperkirakan mencapai 1,07 juta barel/hari, lebih rendah dari yang ditargetkan dalam APBN 2004 sebesar 1,15 juta barel/hari.

Dari sisi fiskal, langkah-langkah strategis yang telah ditempuh pemerintah telah membawa peningkatan pendapatan negara dan hibah, yang

dalam semester I tahun 2004 mencapai Rp 144,8 triliun atau 41,4 persen dari sarannya dalam APBN 2004. Pencapaian itu berarti 5,5 persen lebih tinggi dari realisasinya dalam periode yang sama dalam tahun 2003.

Realisasi pendapatan negara dan hibah dalam semester I 2004 tersebut bersumber dari penerimaan perpajakan Rp 118,9 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 25,8 triliun, dan hibah Rp 48,9 miliar, atau masing-masing mencapai 43,7 persen, 33,5 persen, dan 7,7 persen dari targetnya dalam APBN 2004.

Pada sisi belanja negara, realisasi dalam semester I tahun 2004 mencapai Rp 163,3 triliun atau 43,6 persen dari pagunya dalam APBN 2004. Pencapaian realisasi tersebut bersumber dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 101,3 triliun dan belanja untuk daerah sebesar Rp 62,0 triliun, yang berarti masing-masing mencapai 39,7 persen dan 52,1 persen dari pagunya dalam APBN 2004.

Realisasi belanja pemerintah pusat tersebut mencakup Rp 84,9 triliun untuk pengeluaran rutin dan Rp 16,4 triliun untuk pengeluaran pembangunan. Dibandingkan dengan *performance* dalam periode yang sama tahun sebelumnya, realisasi belanja pemerintah pusat dalam semester I 2004 tersebut naik 18,9 persen.

Dalam periode yang sama, realisasi belanja untuk daerah mencapai Rp 62,0 triliun, yang terdiri dari dana perimbangan Rp 57,1 triliun, serta dana otonomi khusus dan penyesuaian Rp 4,9 triliun.

Dari keseluruhan realisasi dana perimbangan tersebut, Rp 47,8 triliun dialokasikan untuk dana alokasi umum (DAU), Rp 8,9 triliun untuk dana bagi hasil (DBH), dan Rp 0,4 triliun untuk dana alokasi khusus (DAK). Dibandingkan dengan pencapaian dalam semester I 2003, realisasi belanja untuk daerah dalam semester I 2004 tersebut lebih tinggi 13,8 persen. (yat)

MONITOR BERITA

<input checked="" type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH FORUM <input type="checkbox"/> INVESTOR IND. <input type="checkbox"/>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KODE : LISTRIK GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 MIGAS UMUM

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

HALAMAN : 1 TAHUN 2004

'Medco tak akan lepas aset di Timur Tengah'

JAKARTA (Bisnis): PT Medco Energi Internasional Tbk tidak akan melepas aset Novus Petroleum Ltd di Indonesia seperti Kakap dan Brantas serta ladang migas di Timur Tengah.

"Di ladang Timur Tengah kami masih mempunyai kepemilikan sekitar 51% dan akan tetap dipertahankan karena Medco akan menjadi operator," ujar Direktur Keuangan Medco Sugiharto kepada pers kemarin.

Jika di Timur Tengah Medco akan mempertahankan asetnya, lain halnya dengan yang di AS. Perusahaan itu mengkaji kemungkinan untuk melepas kekayaannya di negara Paman Sam tersebut.

Menurut dia, berdasarkan penilaian dari perusahaan independen, nilai dari aset di Timur Tengah tersebut sekitar US\$32 juta, sedangkan aset yang akan dilepas kepada Santos Ltd senilai US\$110 juta-US\$113,5 juta.

Kini, tuturnya, Medco masih memfinalisasi perjanjian dan menghitung implikasi dari penjualan terutama terkait pajak.

Mengenai rencana PTTEP dan CSFB menjual sahamnya di New Links Energy Re-

sources—pemegang 85,5% saham Medco—, Sugiharto mengatakan hingga kini belum terjadi perubahan komposisi pemegang saham di perusahaan minyak dan gas publik terbesar di Indonesia itu.

"Mereka mempunyai wacana untuk menjual sahamnya di New Links, bukan di Medco," katanya.

Pemilik New Links diketahui adalah Encore, PTTEP, dan CSFB masing-masing 40,1%, 40%, dan 19,9%.

Dia mengatakan Medco tidak dapat berkomentar soal rencana penjualan saham di New Links karena hal itu tidak terjadi pada saham perseroan.

"Medco itu terpisah dari New Links sehingga tidak layak untuk menanyakan soal itu kepada saya. Saya sudah menjelaskan kepada Bapepam bahwa belum terdapat perubahan susunan saham Medco," katanya.

Target penemuan

Sebelumnya, dia mengatakan Medco bakal memperoleh pemasukan US\$285,5 juta atas penjualan aset anak perusahaan Novus Petroleum Ltd yang berada di Australia, Amerika, dan Timur Tengah.

Menurut Sugiharto, hasil divestasi anak perusahaan itu dapat dimanfaatkan untuk pengembangan usaha seperti membiayai akuisisi lapangan minyak dan gas di Qatar dan Yaman.

"Dengan hasil penjualan anak perusahaan itu, kami tak perlu meminjam ke bank jika akan mengakuisisi sejumlah lapangan minyak di Qatar dan Yaman. Sehingga dengan demikian kami dapat masuk ke kawasan yang merupakan sumber minyak dunia itu," katanya. (Bisnis, 25 Juni)

Dia mengatakan aset perusahaan yang berada di Australia itu akan dijual kepada perusahaan minyak Australia Santos Ltd dengan harga estimasi perusahaan penilai independen mencapai US\$110 juta termasuk Wunut senilai US\$3,5 juta.

Sedangkan aset anak perusahaan baru yang ada di Timur Tengah, lanjut dia, akan dilego kepada kongsi meraka asal Uni Emirat Arab Silk Route Investments. Nilai penjualan aset ini diperkirakan sekitar US\$32 juta.

Sementara aset Novus yang ada di Amerika, disebutkan akan memberikan kontribusi sebesar US\$140 juta. (wiw)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input checked="" type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH FORUM <input type="checkbox"/> INVESTOR IND. <input type="checkbox"/>										
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL <input type="checkbox"/> UMUM										
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL <u>AGST</u> SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 <u>26</u> 27 28 29 30 31 HALAMAN: 8.8 TAHUN 2004											

Nymex naikkan margin transaksi minyak mentah

NEW YORK (Bloomberg): New York Mercantile Exchange, bursa berjangka energi terbesar dunia, akan meningkatkan permintaan margin atas kontrak minyak mentahnya.

Margin pada kontrak berjangka minyak mentah Oktober dan November dan kontrak berjangka swapkalender yang meningkat menjadi US\$3.000 dari US\$2.500 untuk anggota kliring, menjadi US\$3.300 dari US\$2.750 untuk anggota serta menjadi US\$4.050 dari US\$3.375 untuk pelanggan, ungap bursa.

Margin untuk produk yang disebut sebagai *e-mini futures*-- separuh size dari kontrak normal,

akan meningkat hingga US\$1.500 dari US\$1.250 untuk anggota kliring. Selain itu, hingga US\$1.600 dari US\$1.375 untuk anggota bursa dan hingga US\$2.025 dari US\$1.688 untuk nasabah. Kontrak *e-mini futures* diperkenalkan pada Juni 2002.

Harga minyak mentah untuk pengiriman Oktober merosot US\$0,84, atau 1,8% menjadi US\$45,21 per barel, setelah menyentuh US\$49,40 pekan lalu, posisi tertinggi sejak minyak mulai diperdagangkan di New York 1983.

Sementara kontrak berjangkanya sudah menguat 39% tahun ini. (roy)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
HALAMAN: 15 TAHUN 2004

Speculators drive oil prices: Kuwait

Kuwait's foreign minister said on Wednesday that Middle East oil exporters are producing at maximum capacity to stabilize prices that are being driven up by speculators from outside the region.

Oil prices have soared for weeks as traders worried about the threat of sabotage against the Iraqi oil infrastructure and a possible decline in Russia's oil production.

A rash of buying by institutional investors also contributed to the price rise,

fueling concern that crude oil would top US\$50 per barrel. But the markets have cooled this week and oil prices dropped for a third straight day to \$45 per barrel on Tuesday.

Kuwait's Foreign Minister Sheik Mohammed Sabah Al Salem Al Sabah said in New Delhi, however, the price drop was not enough.

"We would like to see stable, lower oil prices. We are producing at maximum capacity, hoping to stabilize the prices," he told reporters.

"The oil prices have been

driven up by speculation. It's been driven by people who are outside the region," Sheik Mohammed said. "Still, they are high and the producers are not responsible for this."

Sheik Mohammed was in the Indian capital to sign a framework agreement to start negotiations on a free trade pact with India.

"It is in our interest to increase shipments to India," he said. "We are considering increasing (crude) supplies to India. We are also interested in investing in India's refinery business." — AP

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input checked="" type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH FORUM <input type="radio"/> INVESTOR IND. <input type="radio"/>																																											
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL <input type="checkbox"/> UMUM																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>JAN</th> <th>FEB</th> <th>MAR</th> <th>APR</th> <th>MEI</th> <th>JUN</th> <th>JUL</th> <th>AGST</th> <th>SEPT</th> <th>OKT</th> <th>NOV</th> <th>DES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td> </tr> </tbody> </table>		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31														
HALAMAN : 6																																												
TAHUN 2004																																												

Oil prices and the national budget

The oil price assumption of US\$24 per barrel in the 2005 state budget draft has been widely criticized, as the world market price of oil has already reached \$50 per barrel. The high price of oil on the international market, which could probably stay like that for a long period, is likely to burden the Indonesian economy in the coming months.

The high price stems from the conflict in Iraq, a rise in China's crude oil imports, the high demand for oil in India and a decrease in America's oil supply.

An fuel subsidy increase to Indonesia's state oil and gas company, PT Pertamina, might disturb the economy. With the oil price assumption at \$24 per barrel, Pertamina will receive a subsidy of 1 percent of the gross national product.

In this regard, why has the government not changed the assumption in the 2005 state budget draft as it did in the 2004 state budget, where the oil price was set at \$36 per barrel?

The government should thus be more active in energy diversification and conservation, increase oil and gas production and encourage energy efficiency.

In the name of energy conservation, the government should consider the possibility of increasing the domestic price of oil to adjust to the skyrocketing world market price of the commodity.

Bisnis Indonesia believes that maintaining the oil price assumption at \$24 per barrel was done merely for political reasons prior to the presidential election on Sept. 20. We also believe that whoever is elected as the next president will eventually be forced to increase the domestic price of oil.

Raising the domestic oil price is an unpopular decision, but it is one risk the country's leader needs to face. On the other hand, people should not be spoiled by the low fuel price policy, but be taught about the hardships the country is facing.

— *Bisnis Indonesia*, Jakarta

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL **AGST** SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 **26** 27 28 29 30 31

HALAMAN : 4

TAHUN 2004



ISI MINYAK: Seorang pekerja sedang mengisi minyak tanah ke mobil tanki di pusat distribusi minyak tanah di Jakarta, Rabu (25/08). Melonjaknya harga minyak bumi diperkirakan bakal mengganggu laju perekonomian, akibat membengkaknya jumlah subsidi yang harus dikeluarkan.

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 3

TAHUN 2004

Pemerintah Tak Akan Naikkan BBM Dan Kebutuhan Pokok

JAKARTA (Suara Karya): Menteri Keuangan Boediono menegaskan, pemerintah tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan kebutuhan pokok hingga pemilihan presiden putaran kedua. Setelah pilpres putaran dua, soal BBM dan harga kebutuhan pokok diserahkan kepada pemerintah dan kabinet mendatang, mau menaikkan atau tidak.

"Kebijakan itu ditempuh oleh pemerintah sekarang, kata Menkeu adalah untuk memelihara suasana tenang dalam masa pemilu. "Salah satu unsur pemeliharaan ketenangan ini adalah harga bahan pokok. Setelah itu, pemerintah mendatang yang menentukan," ungkap Menkeu Boediono di Jakarta, kemarin.

"Tidak menaikkan harga BBM dan kebutuhan pokok itu, tujuannya untuk mempertahankan suasana tertib dan tenang supaya rakyat bisa mencoblos dengan tenang. Sedangkan pascapilpres dilihat nanti bagaimana suasananya, masih ada waktu untuk menempuh kebijakan yang sesuai menurut pemerintah yang akan datang.

"Menkeu tidak mengatakan keputusan untuk tidak menaikkan harga BBM dan kebutuhan pokok (sembilan bahan pokok), itu tidak akan dikoreksi lagi. Pemerintah yang akan datang melihat, situasinya pada saat nanti.

Perihal kebijakan sama yakni tidak menaikkan harga khususnya BBM diungkapkan Kepala Badan Analisa Fiskal Depkeu Anggito Abimanyu sehari sebelumnya dalam rapat paripurna mengenai nota keuangan dan

RAPBN 2005 dengan DPR saat ditanya wartawan mengenai kenaikan harga BBM berkaitan dengan melambungnya harga minyak di pasar dunia.

Menurut Anggito, dengan menahan kenaikan harga minyak diharapkan pemerintah hasil pilpres dapat menggunakan dana subsidi minyak dengan sebaik-baiknya, dengan prinsip kehati-hatian.

Menkeu Boediono dalam rapat dengan panitian anggaran di DPR kemarin, masih mendapat pertanyaan mengenai perubahan harga minyak menjadi 36 dolar AS per barel, Ia mengatakan, perhitungan harga sebesar itu untuk APBN 2004 berlaku mulai Januari sampai akhir tahun. Itulah harga rata-rata yang diputuskan pemerintah berkaitan kenaikan harga minyak dunia. Harga minyak Indonesia itu dibawah harga yang biasa diumumkan seperti minyak Texas, dan sebagainya.

Berkaitan dengan bakal kesulitan dipenuhinya dana anggaran APBN 2004 melalui privatisasi dan divestasi bank BNI dan saham kecil pemerintah di PT Antam dan lainnya akibat belum disetujuinya divestasi itu oleh DPR sementara waktu semakin kasib, maka akan dibicarakan lagi dengan DPR.

Kalaupun angka lima triliun rupiah yang ditargetkan dari privatisasi dan divestasi tidak tercapai, Boediono menjelaskan bahwa hal itu hanyalah rancangan. Namun, pemerintah tetap akan memahaminya dengan DPR. (CW-2)

37

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE: LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HALAMAN: 4												TAHUN 2004																		

Pemerintah Tak Naikkan Harga BBM dan Bahan Pokok

JAKARTA, KOMPAS — Meskipun beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2004 meningkat cukup besar akibat pembengkakan subsidi hingga Rp 63 triliun, pemerintah memastikan tidak akan menaikkan harga bahan pokok dan harga bahan bakar minyak.

"Kebijakan pemerintah sekarang ini adalah memelihara dan menjaga suasana tenang menjelang pemilihan presiden dan wakil presiden. Salah satu unsur dari pemeliharaan itu adalah harga-harga yang stabil, termasuk harga bahan pokok dan juga BBM. Setelah itu, pemerintah baru yang akan memutuskan, apakah kebijakannya itu tetap sama atau tidak," ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Boediono di Jakarta, Rabu (25/8).

Menkeu mengungkapkan hal itu sebelum mengikuti rapat kerja dengan Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semester I tahun 2004.

Sementara itu, Wakil Direktur Utama PT Pertamina Mustiko Saleh dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VIII DPR mengatakan, akibat lonjakan harga minyak, Pertamina terpaksa mengeluarkan biaya lebih banyak untuk pengadaan bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri.

Badan usaha milik negara (BUMN) ini harus mengeluarkan biaya sekitar 800 juta dollar Amerika Serikat (AS) hingga 1 miliar dollar AS per bulan (setara Rp 7,2 triliun hingga Rp 9 triliun dengan kurs Rp 8.500 per dollar AS) per bulan jika harga minyak menyentuh level

45 dollar AS per barrel.

Impor minyak mentah dan BBM mutlak dilakukan untuk menjaga keamanan pasokan BBM dalam negeri. Jika harga minyak terus bertahan di atas 40 dollar AS per barrel, pemerintah terpaksa harus membantu menjaga arus kas Pertamina agar BUMN itu sanggup mengimpor minyak mentah dan BBM.

Pasalnya, jatah subsidi BBM dari pemerintah hanya sebesar Rp 63 triliun untuk keseluruhan tahun 2004, dengan asumsi harga minyak hanya 36 dollar AS per barrel.

Sebelumnya, akibat perubahan harga minyak mentah dunia sampai 49 dollar AS per barrel, pemerintah terpaksa mengajukan revisi APBN 2004 lebih cepat dari waktunya kepada DPR. Asumsi harga minyak mentah yang sebelumnya 22 dollar AS per barrel direvisi menjadi 36 dollar AS per barrel.

Perubahan asumsi harga minyak mentah menyebabkan subsidi BBM membengkak dari sebelumnya Rp 14,5 triliun menjadi Rp 63 triliun. Sementara defisit anggaran naik dari 1,2 persen dari produk domestik bruto (PDB) menjadi 1,3 persen dari PDB.

Subsidi untuk industri

Menjawab pertanyaan anggota Panitia Anggaran DPR, Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Departemen Keuangan Darmin Nasution mengatakan, dengan harga rata-rata minyak mentah sepanjang tahun 2004 sebesar 36 dollar AS per barrel dan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS sebesar Rp 8.900, total penerimaan minyak dan gas (migas) menjadi Rp 109,9 triliun.

"Penerimaan migas itu terdiri dari pajak penghasilan migas

Rp 23,0 triliun, penerimaan sumber daya alam (SDA) migas Rp 86,8 triliun. Subsidi menjadi Rp 63,0 triliun, konsumsi BBM 59,6 juta kiloliter per hari untuk sepanjang tahun. Sedangkan dana bagi hasil (DBH) ke daerah penghasil migas naik dari sebelumnya Rp 8,4 triliun menjadi Rp 17,4 triliun," papar Darmin Nasution.

Dengan produksi minyak tetap, yakni 1,072 juta barrel per hari (bph), realisasi harga minyak mentah dari Januari sampai dengan Juli 2004 rata-rata 34,1 dollar AS per barrel. Selama Agustus-Desember 2004, rata-rata harga minyak diperkirakan 38,65 dollar AS per barrel.

"Kalau dirata-rata setahun, maka harga minyak mentah menjadi 36 dollar AS per barrel," ujarnya.

Perkiraan realisasi produksi (*lifting*) minyak mentah Indonesia pada tahun 2004 sebesar 1,072 juta bph itu lebih rendah dari yang ditetapkan dalam APBN 2004, yakni 1,15 juta bph.

Darmin mengakui, pembengkakan subsidi BBM hingga Rp 63 triliun itu bukan hanya mencakup subsidi untuk BBM yang dikonsumsi rumah tangga, tetapi juga jenis BBM yang digunakan industri.

Ancaman UU Migas

Direktur Utama Pertamina Widya Purnama mengatakan, Pertamina akan meningkatkan kapasitas penimbunan di terminal Balongan sebanyak 259.000 kiloliter pada tahun 2005; terminal Tuban 450.000 kiloliter tahun 2007, Cikampek 89.000 kiloliter tahun 2005, depot Teras 60.000 kiloliter pada tahun 2006.

Selain itu, Pertamina saat ini tengah menjajaki pembelian minyak mentah secara langsung dari beberapa negara, antara

PERKIRAAN REALISASI PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN 2004*
(MILIAR RUPIAH)

Uraian	APBN	% thd PDB	Perkiraan Realisasi	% thd PDB	% thd APBN
1. Perbankan Dalam Negeri	19.198,6	1,0	23.911,8	1,2	124,5
a. Rekening Dana Investasi (RDI)	13.198,6	0,7	13.198,6	0,7	100,0
b. Dana Non-RDI	6.000,0	0,3	10.713,2	0,5	178,6
2. Privatisasi	5.000,0	0,3	5.000,0	0,3	100,0
3. Penjualan Aset Program Restrukturisasi Perbankan	5.000,0	0,3	12.913,3	0,6	258,3
4. Surat Utang Negara (neto)	11.357,7	0,6	8.225,3	0,4	72,4
a. Penerbitan	32.500,0	1,6	32.300,8	1,6	99,4
b. Pembayaran Pokok dan Pembelian Kembali	-21.142,3	-1,1	-24.075,5	-1,2	113,9
I. Pembayaran Pokok	-20.142,3	-1,0	-23.075,5	-1,2	114,6
II. Pembelian Kembali	-1.000,0	-0,1	-1.000,0	-0,1	100,0
5. Pembiayaan Luar Negeri (neto)	-16.138,7	-0,8	-23.778,9	-1,2	147,9
a. Penarikan Pinjaman Luar Negeri	28.237,0	1,4	21.745,6	1,1	77,0
I. Pinjaman Program	8.500,0	0,4	3.140,8	0,2	37,0
II. Pinjaman Proyek	19.737,0	1,0	18.604,8	0,9	94,3
b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	-44.375,7	-2,2	-45.524,5	-2,3	102,6
Jumlah	24.417,6	1,2	26.271,6	1,3	107,6

Catatan: *Perbedaan satu angka di belakang koma terhadap angka penjumlahan adalah karena pembulatan.

**Ralat asumsi dasar makro-ekonomi (Kompas, 25/8) untuk tingkat inflasi yang benar adalah 7,0%, kurs rupiah Rp 8.900 per dollar AS, suku bunga SBI 3 bulan 7,6% dan produksi minyak 1,072 juta barrel per hari.

Sumber: Depkeu.

lain Rusia dan Arab Saudi.

"Kami akan coba impor langsung tanpa melalui anak perusahaan Pertamina," ujarnya.

Mustiko menjelaskan, Undang-Undang Minyak dan Gas Nomor 22 Tahun 2001 bisa mengancam keamanan pasokan BBM di dalam negeri karena memperbolehkan perusahaan minyak yang menjadi kontraktor bagi hasil (KPS) di Indonesia untuk menjual sendiri minyaknya. Pasalnya, jika terjadi penurunan produksi di dalam negeri, bisa saja mereka tetap menjual minyak mereka ke luar negeri.

Ia juga mengatakan, kilang-kilang Indonesia juga terancam tidak mendapatkan minyak mentah saat liberalisasi Migas dimulai tahun 2005. Alasannya, biaya produksi minyak di dalam negeri yang rata-rata 3 dollar AS dinilai terlalu mahal, sementara di luar negeri lebih rendah. (HAR/BOY)

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input checked="" type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH FORUM <input type="checkbox"/> INVESTOR IND. <input type="checkbox"/>
KODE: <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HALAMAN: 6 TAHUN 2004	

Fuel subsidies wasted

The steep oil price hike since May — to as high as US\$50 per barrel now — has finally forced the Indonesian government to revise upward from \$22 to \$36 per barrel the average oil price used to estimate oil tax revenues and the cost of fuel for the current fiscal year. However, the contingency measure Minister of Finance Boediono proposed to the House of Representatives on Tuesday does not, by any means, bring about fundamental changes to basic energy policy.

The government, instead, has decided to abandon its sensible, fuel-economic, 2002 policy to float domestic fuel prices on market quotations in Singapore to encourage efficient use, slash subsidies, target price support only to poor consumers (kerosene for household use) and, most importantly, minimize smuggling overseas. Consequently, fuel subsidies for 2004 will balloon to more than Rp 63 trillion (\$7.08 billion), much more than total central government spending on its personnel (civil servants, the police and the military).

Since the government maintains domestic fuel prices way below actual production costs — applying a blanket subsidy on all kinds of fuel — the bulk of the subsidies may end up benefiting mostly private car owners (middle and top-income consumers). Most devastatingly, fuel smugglers will receive even stronger incentives, as their profit margins will skyrocket.

True, part of the subsidy will go on kerosene, which is widely used by poor people. But corruption will continue to divert quite a significant portion of this cheap fuel to industrial users and smugglers.

Until last year (when Indonesia was still a net oil exporter), any increase in international crude oil prices would give the government net additional revenues. However, starting this year, as the country is already a net oil importer of about 36,000 barrels a day, an oil-price hike immediately cuts into central government income as additional revenues are much less than additional spending on subsidies.

The problem is that fuel subsidies are borne by the central government alone, while a larger portion of the additional revenues from higher oil export prices must be shared with local administrations, in line with the 1999 law on fiscal relations between the central government and regional administrations.

It would be political suicide for the present government to adjust domestic fuel prices to international market quotations, especially as the incumbent president, Megawati Soekarnoputri, will also compete in the Sept. 20 runoff. Moreover, raising fuel prices now could affect political stability in the run-up to the presidential election.

However, by doing virtually nothing to stop profligacy in the use of oil or to target better the bulk of subsidies to the poor is simply to plant a time bomb for the new government. The subsidy amounts to a future tax that has to be paid sooner or later.

The verdict among most energy analysts now is that the era of cheap oil is already over; they point out that the steep oil price rise since late May is not speculative in nature. Nor is the trend primarily a supply shock. The plain truth is that the world is consuming almost all new supplies gushing out from the ground. OPEC producers no longer have enough spare capacity to meet the insatiable global thirst for fuel, especially the steadily high demand from China's economy, which keeps growing by 7 percent to 8 percent per year.

Worse still, analysts say, the cushion of extra supply is so thin at a time when troubles are popping up in major oil-producing countries, such as Iraq and Russia. Years of underinvestment by the oil industry in everything from drilling to refining have left produce with little to fuel the world.

As long as Indonesia depends on a dwindling supply of oil, the threat of economic downturn will remain. Therefore, the new government will have to make radical changes in the way energy is used: That could be achieved immediately by curtailing fuel subsidies in the draft 2005 budget and targeting such subsidies only to kerosene for household use.

Improving energy efficiency and conservation takes a long time but it could be done if consumers were forced to pay the real economic cost of fuel.

Indonesia is endowed with a wide variety of energy resources such as oil, natural gas, geothermal steam, coal and hydropower.

These alternative resources will become more commercially viable now as the era of cheap oil seems to be over. This would be especially true if the government made the investment climate in the energy industry much more attractive and competitive to other countries.

MONITOR BERITA

ISNIS INDONESIA
OMPAS
ORAN TEMPO
EDIA INDONESIA
ERACA
KIRAN RAKYAT
AKYAT MERDEKA
EPUBLIKA
JARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

E: LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

N FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

AMAN: 5

TAHUN 2004

Kenaikan Subsidi BBM Disesalkan

Pemerintah tak akan menaikkan harga BBM hingga proses pemilu presiden berakhir.

JAKARTA — Sejumlah ekonom menyesalkan pembengkakan dana subsidi bahan bakar minyak (BBM) hingga Rp 63 triliun akibat pemerintah tak mau menaikkan harga bahan bakar tersebut. Kebijakan itu dinilai hanya bermuatan politis menjelang pemilihan presiden 20 September.

"Ini kebijakan yang salah dan hanya bermuatan politis," kata ekonom Indef Iman Sugema kemarin. Sebab, subsidi BBM tersebut dinikmati oleh orang-orang kaya. Pemerintah, kata dia, hanya ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa situasinya masih oke-oke saja. "Padahal, ini masalah besar. Pemerintah justru meninggalkan bom waktu berupa subsidi yang sangat besar."

Menurut dia, jika pemerintah tidak merevisi alokasi subsidi BBM seperti tertuang dalam APEN Rp 14,5 triliun, pemerin-

tah akan mendapat kelebihan dana hingga hampir Rp 50 triliun. Dana itu bisa digunakan untuk menghapuskan kemiskinan puluhan juta orang. "Katakanlah dari jumlah itu, Rp 40 triliunnya dibagi-bagi untuk orang miskin masing-masing Rp 1 juta per orang. Maka, ada 40 juta orang miskin yang dapat bantuan."

Ekonom Citigroup Anton Gunawan juga menyayangkan pembengkakan subsidi BBM hingga Rp 63 triliun. Sebab, kata dia, bukan masyarakat miskin yang menikmati. "Seharusnya subsidi BBM dicabut dan dialihkan ke sektor lainnya yang benar-benar membutuhkan, seperti beras dan pendidikan murah," kata dia kepada *Koran Tempo* di Jakarta kemarin.

Menurut dia, siapa pun presiden yang akan terpilih nantinya program yang harus dilakukan adalah menaikkan harga BBM untuk mengurangi subsidi. Awal tahun depan adalah saat yang tepat untuk melakukan itu. Hanya saja, dia mengingatkan, perlu sosialisasi ke masyarakat untuk rencana kenaikan harga BBM. Anton mengakui, program pe-

ngurangan subsidi BBM akan sulit dilakukan oleh pemerintahan yang benar-benar baru. Alasannya, perlu masa konsolidasi yang lama antara satu departemen dan departemen lain. "Semantara itu, bagi pemerintahan dengan orang-orang lama tentu akan lebih mudah," ujarnya.

Menteri Keuangan Boediono memastikan pemerintah tak akan menaikkan harga BBM dan bahan pokok hingga proses pemilihan umum presiden tahap kedua berakhir, kendati subsidi BBM membengkak dan defisit anggaran juga meningkat menjadi Rp 26,3 triliun. Menurut dia, kebijakan ini untuk menjaga agar iklim proses pemilihan presiden berlangsung tenang, aman, dan tertib. Dengan demikian, rakyat juga bisa memilih dengan tenang sesuai dengan pilihan hati nuraninya.

"Salah satu unsur pemeliharaan ketenangan ini adalah harga-harga yang stabil, seperti BBM, gula, dan beras," kata Boediono dalam rapat kerja dengan Panitia Anggaran DPR di Jakarta kemarin. "Maka, selama masa yang kami anggap krusial ini, kami upa-

yakan harga-harga tetap stabil."

Menurut dia, semua pihak harus menerima perubahan patokan asumsi dasar harga minyak mentah dalam APBN 2004 menjadi US\$ 36 per barel yang mengakibatkan subsidi BBM membengkak. Patokan ini merupakan konsekuensi dari melambungnya harga minyak yang agak gila-gilaan.

"Kalau menyesuaikan dari waktu ke waktu dengan harga luar negeri (yang sempat bertengger di level US\$ 50 per barel), pasti rakyat akan terbebani dan suasana di dalam negeri tidak akan kondusif bagi pemilihan presiden tahap kedua," ujarnya.

Boediono menjelaskan, meski harga minyak mentah dunia terus melambung hingga akhir tahun, keuangan negara tetap aman. Defisit keuangan negara akibat pembengkakan subsidi minyak dapat ditutupi. Karena kenaikan asumsi harga minyak mentah membuat penerimaan negara juga meningkat, meski tidak terlalu seimbang dengan subsidi BBM.

Pemerintah juga menyiapkan sumber-sumber pembiayaan lain

untuk menutupi defisit. Sumber-sumber ini, yaitu dari penjualan aset-aset yang dikelola PT Perusahaan Pengelola Aset Rp 12,9 triliun, kelebihan setoran Badan Penyehatan Perbankan Nasional Rp 5,4 triliun, dan penerbitan surat utang negara Rp 32,5 triliun. Jadi, tidak perlu memangkas pos-pos pembiayaan lain.

Namun, Menteri Keuangan mengingatkan, pos-pos pembiayaan negara yang sudah disepakati seperti anggaran pembangunan Rp 50 triliun tidak ikut-ikutan meningkat, meski subsidi

BBM membengkak sangat besar. "Tetap dipatok di angka itu kalau tidak beban negara akan meningkat," kata dia.

Direktur Jenderal Pajak Hadi Purnomo mengatakan, penerimaan negara dari sektor pajak akan meningkat akibat kenaikan harga minyak sehingga melebihi target APBN 2004. Menurut dia, realisasi penerimaan pajak diperkirakan mencapai Rp 78,2 triliun atau 14 persen dari produk domestik bruto. Jumlah ini berarti lebih tinggi Rp 6,0 triliun dari target. ● ss kurniawari/bagia/heri

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
- KORANJ

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 13

DPRD Banten Minta

TAHUN 2004

Tambah Kuota Minyak Tanah

Serang, KORAN5

Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral diminta segera menambah kuota minyak tanah untuk daerah Banten. Permintaan tambahan kuota itu selain untuk memenuhi kebutuhan minyak tanah bagi masyarakat Banten yang semakin besar, juga untuk mengantisipasi kelangkaan minyak tanah yang belakangan sering terjadi di Banten.

"Kondisi kelangkaan minyak tanah di Banten sudah saya sampaikan langsung kepada Mentamben dan meminta kepada beliau untuk segera memberikan tambahan kuota," ujar Sekretaris Komisi B DPRD Banten, Drs. H. Dahmir Tampubolon, yang mengaku telah bertemu langsung dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI, Purnomo Yusgiantoro, beberapa waktu yang lalu.

Dalam pertemuan itu, Dahmir mengaku menyampaikan langsung kondisi kelangkaan minyak tanah di Provinsi Banten dan meminta penambahan kuota untuk menanggulangnya.

Menanggapi permintaannya itu, Dahmir mengaku, Purnomo menanggapi dengan baik dan berjanji dalam waktu dekat akan segera merealisasikannya.

"Respons beliau sangat bagus, bahkan ia berjanji dalam waktu dekat akan merealisasikannya," lanjut anggota dewan dari Fraksi Golkar ini.

Sebelum bertemu langsung, Dahmir mengaku, Komisi B telah melayangkan surat permohonan tambahan kuota minyak tanah kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

"Suratnya sekarang sudah sampai di meja beliau (Mentamben). Ini usaha kami bahwa juga peduli terhadap keluhan masyarakat yang sering mengalami kelangkaan minyak sehingga harganya jadi mahal," ujarnya.

•Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Komisi B DPRD Banten, Hj. Riril Suhartinah, S.E., meminta kepada Pemprov Banten agar segera mengajukan kuota tambahan minyak tanah kepada pemerintah pusat. Sebab, kuota saat ini sudah dianggap tidak mencukupi kebutuhan masyarakat Banten.

"Pemprov Banten melalui biro perekonomian harus segera mengajukan kuota tambahan minyak tanah. Jangan sampai kelangkaan minyak tanah terus terjadi sehingga masyarakat yang menanggung dampaknya. Padahal, kita tahu stok minyak tanah itu banyak," katanya, Senin (23/8).

Riril mengaku, pihaknya sudah beberapa kali meminta kepada Pemprov Banten agar mengajukan kuota tambahan kepada pemerintah pusat, namun sampai saat ini belum ada realisasinya.

"Kalau sudah terjadi kelangkaan seperti ini, baru bisa diketahui kuota untuk Banten sudah tidak sesuai lagi. Sebab, jumlah masyarakat Banten setiap tahunnya terus bertambah," ujarnya.

Hal senada dikatakan anggota Komisi B Marjuki Raily bahwa kuota minyak tanah untuk masyarakat Banten saat ini sudah tidak mencukupi kebutuhan masyarakat lagi. Soalnya, sudah mengalami pertambahan jumlah penduduk. Karena, itu dibutuhkan tambahan kuota lagi.

"Kuota yang dipakai itu masih berdasarkan jumlah kebutuhan beberapa tahun yang lalu, sementara saat ini tingkat pertumbuhannya cukup tajam," katanya.

Menurut Marjuki, selain meminta tambahan kuota, yang tidak kalah penting adalah Pemprov Banten harus meminta tambahan subsidi minyak tanah kepada Dirjen Anggaran Pemerintah Pusat untuk Provinsi Banten. Pasalnya, pihak Pertamina mengeluarkan minyak tanah untuk Banten disesuaikan dengan jumlah subsidi yang dikeluarkan pemerintah pusat.

"Minyak tanah di Pertamina itu cukup banyak. Mereka siap untuk mengirim berapa pun permintaan Banten, asalkan pemerintah pusat menyetujui tambahan subsidi minyak tanah untuk masyarakat Banten," tegasnya. (ILK/OVL)